

KONSTRUKSI BERITA PASCA PELANTIKAN GUBERNUR BARU DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN – SANDIAGA UNO PERIODE 2017-2022

**(Analisis *Framing* Robert N. Entman Pada Media Online *Kompas.com*,
Detik.com, dan *Republika.co.id*)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Komunikasi Pada Konsentrasi Jurnalistik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Prodi Ilmu Komunikasi



Oleh:

Sapto Andriyanto

6662111012

**KONSENTRASI JURNALISTIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sapto Andriyanto

NIM : 6662111012

Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 16 Agustus 1993

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **KONSTRUKSI BERITA PASCA PELANTIKAN GUBERNUR BARU DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN – SANDIAGA UNO PERIODE 2017-2022 (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online Kompas.com, Detik.com, dan Republika.co.id)** adalah hasil karya sendiri dan seluruh yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila kemudian hari skripsi ini mengandung unsur plagiat, maka gelar keserjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Juli 2018



Sapto Andriyanto

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : Sapto Andriyanto

NIM : 6662111012

Judul Skripsi : KONSTRUKSI BERITA PASCA PELANTIKAN GUBERNUR
BARU DKI JAKARTA ANIES BASWEDAN – SANDIAGA
UNO PERIODE 2017-2022 (Analisis Framing Robert N. Entman
Pada Media Online *Kompas.com*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id*)

Serang, Juli 2018

Skripsi ini telah disetujui untuk disajikan

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Yerry Panji Setianto, S.Sos., M.Si., PhD
NIP. 198212312008011016

Dosen Pembimbing II

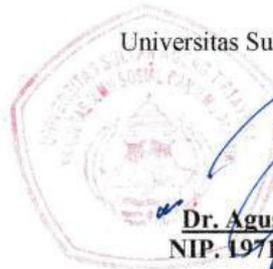


Darwis Sagita, S.Ikom., M.Ikom
NIP. 198305162008121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 19710824005011002

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU DAN POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sapto Andriyanto
NIM : 6662111012
Judul Skripsi : KONSTRUKSI BERITA PASCA PELANTIKAN GUBERNUR BARU DKI
JAKARTA ANIES BASWEDAN – SANDIAGA UNO PERIODE 2017-2022
(Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online *Kompas.com*,
Detik.com, dan *Republika.co.id*)

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, 24 Juli 2018 dan dinyatakan
LULUS

Serang, 24 Juli 2018

Ketua Penguji :

Dr. Idi Dimiyati, S.I.Kom., M.I.Kom

NIP: 197810152005011001

Anggota :

Ail Muldi, S.Sos., M.I.Kom

NIP: 198303062015041001

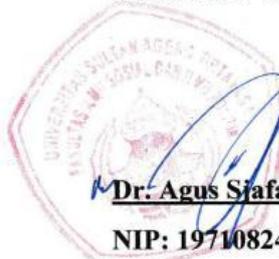
Anggota :

Darwis Sagita, S.I.kom., M.I.Kom

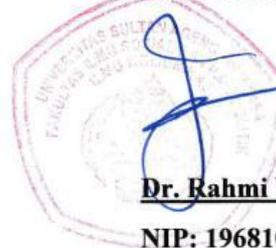
NIP: 198305162008121002

Mengetahui

Dekan FISIP UNTIRTA


Dr. Agus Stafari, M.Si
NIP: 197108242005011002

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi


Dr. Rahmi Winangsih, M.Si
NIP: 19681019200512001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Identifikasi Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.5.2 Manfaat Teoritis.....	10
1.5.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Komunikasi Massa Sebagai Media Penyampaian Informasi.....	11
2.2 Media Online Sebagai Media Massa	13
2.3 Objektivitas Berita Dalam Media Massa.....	15
2.4 Teori Framing	17
2.5 Model Framing Robert N. Entman	20
2.6 Kerangka Berpikir	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24

3.1	Sifat dan Jenis Penelitian	24
3.2	Metode Penelitian	25
3.3	Instrumen Penelitian	26
3.4	Unit Analisis	27
3.5	Teknik Pengumpulan Data	29
3.6	Teknik Analisis Data	30
3.7	Uji Keabsahan Data	31
3.8	Jadwal Penelitian	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		34
4.1	Deskripsi dan Objek Penelitian	34
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	40
4.2.1	Analisis Framing Pemberitaan <i>Kompas.com</i>	41
4.2.2	Analisis Framing Pemberitaan <i>Detik.com</i>	54
4.2.3	Analisis Framing Pemberitaan <i>Republika.co.id</i>	66
4.3	Pembahasan	79
4.3.1	Frame <i>Kompas.com</i> , <i>Detik.com</i> dan <i>Republika.co.id</i> : Penggunaan kata ‘pribumi’	79
4.3.2	Frame <i>Kompas.com</i> , <i>Detik.com</i> dan <i>Republika.co.id</i> : Penataan PKL kawasan Tanah Abang.....	81
4.3.3	Frame <i>Kompas.com</i> , <i>Detik.com</i> dan <i>Republika.co.id</i> : Pelatihan Program OK OCE	82
4.3.4	Frame <i>Kompas.com</i> , <i>Detik.com</i> dan <i>Republika.co.id</i> : Pengoperasian Becak	84

4.3.5	Frame <i>Kompas.com</i> , <i>Detik.com</i> dan <i>Republika.co.id</i> : Pencabutan Larangan Melintas Sepeda Motor.....	85
BAB V PENUTUP		87
5.1	Kesimpulan.....	87
5.2	Saran	88
1.	Saran Praktis.....	88
2.	Saran Teoritis.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	23
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Teknis Media Cetak dengan Media Online	14
Tabel 2.4. Elemen Framing Robert N. Entman	22
Tabel 3.1. Berita Media Online <i>Kompas.com</i>	28
Tabel 3.2. Berita Media Online <i>Detik.com</i>	28
Tabel 3.3. Berita Media Online <i>Republika.co.id</i>	29
Tabel 3.4. Analisis Data	31
Tabel 3.5. Jadwal Penelitian	33
Tabel 4.1. Analisis Berita 1	41
Tabel 4.2. Analisis Berita 2	44
Tabel 4.3. Analisis Berita 3	47
Tabel 4.4. Analisis Berita 4	49
Tabel 4.5. Analisis Berita 5	52
Tabel 4.6. Analisis Berita 6	55
Tabel 4.7. Analisis Berita 7	57
Tabel 4.8. Analisis Berita 8	59
Tabel 4.9. Analisis Berita 9	61
Tabel 4.10. Analisis Berita 10	64
Tabel 4.11. Analisis Berita 11	66
Tabel 4.12. Analisis Berita 12	69
Tabel 4.13. Analisis Berita 13	71
Tabel 4.14. Analisis Berita 14	74
Tabel 4.15. Analisis Berita 15	76

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"When you want something, all the universe conspires in helping
you to achieve it."*

(Paulo Coelho)

Bismillah...

Skripsi ini kupersembahkan

Untuk kedua orang tua dan adik

Yang tiada hentinya memberikan semangat dan doa

ABSTRAK

Sapto Andriyanto. NIM. 6662111012. Skripsi. Konstruksi Berita Pasca Pelantikan Gubernur Baru DKI Jakarta Anies Baswedan – Sandiaga Uno Periode 2017-2022 (Analisis Framing Robert N. Entman Pada Media Online Kompas.com, Detik.com, Dan Republika.co.id). Pembimbing I Yearry Panji S, PhD., dan Pembimbing II Darwis Sagita, M.I.Kom

Latar belakang dalam penelitian adalah untuk mengupas *Kompas.com*, *Detik.com* dan *Republika.co.id* dalam mengonstruksi realitas berita mengenai pasca dilantikanya Gubenur baru DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Objek penelitian ini adalah kumpulan berita mengenai polemik maupun berbagai kebijakan yang dimulai sejak pelantikan hingga 100 hari Anies-Sandi menjabat. Jumlah keseluruhan berita yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media online *Kompas.com*, *Detik.com* dan *Republika.co.id* dalam membingkai berita pasca pelantikan Anies-Sandi dan mengetahui bagaimana media online *Kompas.com*, *Detik.com* dan *Republika.co.id* memberitakan pasca pelantikan Anies-Sandi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan framing Robert N. Entman, Definisi Masalah (*Define Problems*), Memperkirakan Sumber Masalah (*Diagnose Causes*), Membuat Keputusan Moral (*Make Moral Judgement*), Menekankan Penyelesaian (*Treatment Recommendation*). Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa media online *Kompas.com* cenderung mengkritisi kebijakan yang diambil oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno, *Detik.com* lebih netral dalam memberitakan Anies-Sandi, dan *Republika.co.id* cenderung membela kebijakan yang diambil oleh Anies-Sandi.

Kata Kunci: Analisis Framing, Media Online, Pembingkai Berita, Robert N. Entman

ABSTRACT

Sapto Andriyanto. NIM. 6662111012. Thesis. News Construction Post-Inauguration of New Governor of DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno Period 2017-2022 (Framing Analysis Robert N. Entman In Online Media Kompas.Com, Detik.Com, Dan Republika.co.id). The First advisor is Yearry Panji S, PhD., and The Second advisor is Darwis Sagita M.I.Kom

The background in this research is to explore Kompas.com, Detik.com and Republika.co.id in constructing the news reality about the new governor of Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno inaugurated. The object of this research is a collection of news about polemics as well as various policies that began from the inauguration until 100 days serving as governor. The total number of news used in this research is 15 news with each online media 5 news and chosen based on the same theme. In this study, researchers analyzed using analytical method Robert N. Entman framing. Researchers used four Entman devices to analyze the 15 news, four frames used: Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgment, Treatment Recommendations. From the results of the study concluded that the online media Kompas.com tends to criticize the policies taken by Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Detik.com is more neutral in reporting Anies-Sandi, and Republika.co.id tends to defend the policies taken by Anies-Sandi.

Keywords: Framing Analysis, Online Media, Framing News, Robert N. Entman

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam terhaturkan kepada junjungan besar umat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi berjudul “Konstruksi Berita Pasca Pelantikan Gubernur Baru Dki Jakarta Anies Baswedan – Sandiaga Uno Periode 2017-2022 (Analisis *Framing* Robert N. Entman Pada Media *Online Kompas.com, Detik.com, dan Republika.co.id*)” ini, penulis dapat menyelesaikan dengan segenap niat, usaha, semangat, dan kemampuan untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tentu saja dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan didalamnya, bahkan masih jauh dari kata sempurna. Hal itu tentu disebabkan oleh terbatasnya waktu, pengalaman, serta ilmu yang dimiliki penulis.

Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini:

1. Dr. Agus Sjafari, S. Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta jajarannya
2. Dr. Rahmi Winangsih, M.Si. selaku ketua Prodi Ilmu Komunikasi
3. Darwis Sagita, M. Ikom. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi

4. Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, S.Sos., M.Si. selaku pembimbing akademik penulis selama perkuliahan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Yearry Panji S, S. Sos., M. Si., PhD., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, ilmu, dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi
6. Darwis Sagita, S.I.Kom., M.I.kom. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, motivasi, ilmu, dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi
7. Seluruh dosen prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terimakasih karena Bapak/Ibu telah memberikan penulis banyak ilmu bermanfaat selama menjalani proses perkuliahan di kampus ini.
8. Seluruh staff administrasi dan pegawai FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terimakasih sudah membantu kelancaran dalam hal administrasi penulis selama masa kuliah.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Sarido dan Ibu Indri Atun. Terimakasih atas segala doa yang terhaturkan tak henti-hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan mohon maaf atas keterlambatan dalam penyelesaian skripsi ini. Serta, penulis juga berterimakasih kepada adik, Dwi Cahyo Hadi.

10. Terimakasih kepada Fika Yarits Ardhana atas segala *support* dan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis. Sosok yang tak pernah bosan menjadi tempat untuk penulis berkeluh kesah saat merasa jenuh, mengingatkan untuk tetap semangat dan pantang menyerah dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Ka Faya, Ka Fei, Lunar, dan Mei yang turut memberikan *support* kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Diah Rahmawati, Mila Rouza dan M. Asep D. yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Hellmy, Zahra, Yudi, Mutia, Rifki, Fairuz, yang yang memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman-teman kelas C Ilmu Komunikasi Untirta angkatan 2011
15. Teman-teman kelas E Jurnalistik Untirta angkatan 2011
16. Dan seluruh pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu, yang telah memberikan segala dukungan moril maupun materil sehingga skripsi dapat selesai.

Serang, Juli 2018

Sapto Andriyanto

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 tentu saja menarik untuk disimak oleh berbagai kalangan. Jakarta dengan segala polemik yang ada didalamnya tentu saja membutuhkan sosok pemimpin yang mampu mengatasi hal-hal tersebut. Dengan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur, mereka berebut mendapatkan atensi rakyat Jakarta dengan berbagai macam slogan atau kampanye yang dirasa ampuh untuk mengatasi segala permasalahan Jakarta.

Salah satunya adalah yang dilakukan oleh paslon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Dengan *tagline* “Maju Kotanya Bahagia Warganya”, Anies-Sandi ingin memberikan perubahan bagi warga Jakarta. Maksud dari *tagline* “Maju Kotanya Bahagia Warganya” adalah karena Anies merasa pembangunan hanya dari aspek infrastruktur saja, tapi kondisi warganya kurang diperhatikan. Sebab, menurutnya tidak ada kota yang maju apabila manusianya tidak maju secara kualitas. (prs/rmol, 2016, Ini Asal Usul Slogan Anies-Sandi "Maju Kotanya Bahagia Warganya", disunting pada hari Minggu, 11 Februari 2018 pukul 12:05 WIB dari <https://pilkada.jpnn.com/news/ini-asal-usul-slogan-anies-sandi-maju-kotanya-bahagia-warganya>).

Publik mulai mengenal Anies Baswedan saat dirinya mulai menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet

Kerja Presiden Joko Widodo sebelum akhirnya terkena *reshuffle* dan posisinya digantikan oleh Muhadjir Effendy. Sebelum menjadi Menteri, Anies Baswedan dikenal sebagai akademisi dan pernah menjabat sebagai rektor Universitas Paramedina periode 2006-2007. Berbagai prestasi pun pernah diukirnya antara lain *Top 100 Public Intellectuals*, Majalah *Foreign Policy*, Washington, Amerika (2008), *Young Global Leader*, *World Economic Forum* (2009), 500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia dari Lembaga *Royal Islamic Strategic Studies Centre*, Yordania (2010), *Worlds 20 Future Figure*, Majalah *Foresight*, Tokyo, Jepang (2010), dan *Nakasone Yasuhiro Award*, *Institute for International Policy Studies (IIPS)* (2010). (AK/DN, Profil Anies Rasyid Baswedan Ph.D, disunting pada hari Senin, 17 Desember 2017 pukul 19:30 WIB, dari <https://www.viva.co.id/siapa/read/32-anies-baswedan/>)

Wakil gubernur terpilih Sandiaga Uno atau lebih dikenal dengan Bang Sandi merupakan seorang pengusaha sukses yang mempunyai 25 perusahaan dengan total karyawan mencapai 50.000 orang. Pada Tahun 2014, bang Sandi diminta menjadi jubiir Prabowo Subianto di bidang ekonomi dalam Pilpres 2014 lalu. Dan pada April 2015, dirinya diajak bergabung oleh partai Gerindra dan melepaskan jabatannya di 25 perusahaan demi focus menyerap aspirasi warga DKI Jakarta. Barulah pada tahun 2016 silam, tepatnya pada tanggal 23 September 2016, Sandiaga resmi ikut mewarnai Pilkada DKI Jakarta sebagai calon wakil gubernur, berpasangan dengan calon gubernur Anies Baswedan. (Sandiaga Uno, diakses pada hari Senin, 17 Desember 2017 pukul 19:00 WIB, dari <http://jakartamajubersama.com/biografi-sandiaga-uno/>).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, dalam BAB IV Bagian Keempat mengenai Pemerintah Daerah Pasal 24 ayat (5), menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Dalam kepastakaan ilmu politik dan sosiologi politik, pemilihan umum (pemilu) dianggap saat terpenting untuk rekrutmen politik. Pemilu 2004 dicatat sebagai pengalaman baru untuk Indonesia, karena baik calon-calon legislatif maupun calon-calon kepala eksekutif dipilih secara langsung oleh rakyat (Syamsudin, 2005: xi)

Pada peristiwa yang akbar sekelas pilkada tentu menjadi ruang bagi media massa untuk mengaplikasikan fungsinya sebagaimana yang dikatakan oleh Idri Shaffat dalam bukunya, *“Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers”* yang mengungkapkan tiga fungsi utama pers: memberikan informasi, mendidik masyarakat, dan memberikan hiburan bagi para pembaca. Secara normatif fungsi idealisme pers dijelaskan dalam perundang-undangan pers, seperti dalam UU No. 21 Tahun 1982. Pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 disebutkan bahwa fungsi pers adalah alat revolusi dan merupakan media massa yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, informatoris, dan mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong dan petunjuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia (Shaffat, 2008: 25-26).

Dalam pembentukan opini publik ini, media massa pada umumnya melakukan tiga kegiatan sekaligus. Pertama, menggunakan simbol-simbol politik

(*language of politics*). Kedua, melaksanakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*). Ketiga, melakukan fungsi agenda media (*agenda setting function*). Tatkala melakukan ketiga tindakan itu, boleh jadi sebuah media dipengaruhi oleh berbagai factor internal berupa kebijakan redaksional tertentu mengenai suatu kekuatan politik, kepentingan politik para pengelola media, relasi media dengan sebuah kekuasaan politik tertentu, dan factor eksternal seperti tekanan pasar pembaca atau pemirsa, system politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan lainnya. Dengan demikian, boleh jadi suatu peristiwa politik bisa menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing media melaksanakan tiga tindakan tersebut (Hamad, 2004: 2-3).

Pemberitaan terkait tentang Pilkada DKI Jakarta yang mengundang perhatian masyarakat luas dan tentunya media sebagai penyalur atau pemberi informasi kepada khalayak ialah isu SARA yang menimpa salah satu paslon. Bahkan media *online* Tempo.co menyebut, gara-gara Pilkada rasa SARA ini membuat DKI Jakarta mendapat predikat sebagai kota intoleransi. Padahal dalam penelitian tahun 2015, Jakarta mendapat peringkat 65 dari 94 kota toleran. (Setiawan, Kodrat, 2017, diakses pada hari Senin, 17 Desember 2017 pukul 20:00 WIB, diambil dari <https://nasional.tempo.co/read/1045161/kaleidoskop-2017-setelah-pilkada-rasa-sara-dan-politik-identitas>).

Untuk menghindari merebaknya isu Sentiment Suku, Agama, Ras, dan Antar-Golongan (SARA) pada pilkada serentak 2018 maka KPU melakukan langkah anitisipatif dengan membuat dua peraturan, selain itu KPU juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengantisipasi

kampanye hitam dan penggunaan isu SARA. Dua peraturan tersebut adalah, Peraturan pertama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan kedua, PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (diakses pada hari Senin, 18 Desember 2017 pukul 20:00 WIB, diambil dari <http://nasional.Kompas.com/read/2017/10/27/22221201/prihatin-fenomena-pilkada-dki-kpu-atur-soal-isu-sara-dalam-dua-peraturan/>).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, menetapkan kemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno melalui rapat pleno terbuka yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta. Berdasarkan hasil perhitungan KPU DKI Jakarta pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh suara sebanyak 3.240.987 atau 57,96 persen sedangkan pasangan Ahok-Djarot memperoleh hasil suara sebanyak 2.350.366 atau 42,04 persen. Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada DKI putaran ke-dua mencapai 77,08 persen, naik sekitar 1,33 persen dibandingkan putaran pertama kemarin 75,75 persen. Sedangkan pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih sebanyak 5.891 dari 7.568 orang yang terdaftar atau sebesar 77,84 persen (diakses pada hari Senin, 23 April 2018 pukul 15:38 WIB, diambil dari <https://kpujakarta.go.id/view-berita/kpu-dki-tetapkan-hasil-rekap-perolehan-suara-putaran-kedua>)

Presiden Joko Widodo melantik Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017) siang. Prosesi pelantikan Anies-Sandi dimulai pada pukul 16.00 WIB. Prosesi pelantikan itu diawali dengan penyerahan petikan Surat Keputusan Presiden tentang pelantikan kepada Anies-Sandi di Istana Merdeka, Jakarta. Seusai itu, Presiden Joko Widodo memimpin pasukan kirab. Anies-Sandi berada di belakang Jokowi (Januaris Kuwado, Fabian, 2017, diakses pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pukul 09:00 WIB, diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/16/16162801/jokowi-lantik-anies-sandi-sah-jakarta-punya-gubernur-wagub-baru/>).

Ketika ada dua media atau lebih yang mengemas bingkai berita yang berbeda, dan menampilkan sudut pandang yang tentunya akan berbeda pula dalam menampilkan konteks pemberitaan yang berbeda pula kepada khalayak. Perbedaan *head line* berita terjadi karena setiap media memiliki bingkai yang tidak sama dalam melihat sebuah fakta atau sebuah peristiwa. Perbedaan dalam membingkai inilah yang akan menampilkan penulisan berbeda ketika ditampilkan kepada khalayak

Pada dasarnya, *framing* adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. “Cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis *framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis *framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Tiap hari

kita menyaksikan dan membaca bagaimana peristiwa yang sama diberitakan secara berbeda oleh media (Eriyanto, 2008:10).

Isu SARA menjadi isu yang paling banyak diperbincangkan dalam masa kampanye pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dan tentu saja menarik *Kompas.com* maupun *Republika.co.id* untuk memberitakan hal tersebut melalui *framingnya* masing-masing. *Kompas.com* memberitakan bahwa pasangan calon Ahok-Djarot terhambat isu SARA pada putaran pertama pilkada DKI Jakarta, dalam acara yang Rosi yang ditayangkan di Kompas TV (2/4/2017), Djarot menerangkan "Saya merasakan faktor yang dimainkan, mohon maaf, politisasi persoalan SARA. Ini yang selaku dihembuskan di bawah" (Belarminus, Robertus, 2017, diakses pada hari Senin 7 Mei 2017 pukul 21:47 WIB, diambil dari <https://megapolitan.Kompas.com/read/2017/04/02/20243561/djarot.bilang.mereka.dihambat.isu.sara.di.putaran.pertama.pilkada.dki>). Namun hal berbeda justru diberitakan oleh *Republika.co.id*, dihimpun dari data yang oleh Pusat Data Bersatu (PDB) justru pasangan calon Ahok-Djarot lah yang dinilai efektif dalam memanfaatkan isu SARA ini (Saputri, Dessy Suciati, 2017, diakses pada hari Senin 7 Mei 2017 pukul 21:50 WIB, diambil dari <http://www.Republika.co.id/berita/nasional/politik/17/03/17/omyio3330-penelitian-pdb-ahokdjarot-dinilai-efektif-manfaatkan-isu-sara>)

Pembingkaiian berita (*framing*) mulanya ditandai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana (Alex Sobur, 2009:162). Analisis framing banyak digunakan untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek –

aspek khusus sebuah realita oleh media. Seperti latar belakang ideology media, siapa yang diuntungkan dalam berita tersebut, bagaimana berita dikemas hingga siapa saja sumber berita yang digunakan adalah sebagian dari aspek – aspek yang dianalisis di analisis framing ini.

Dalam ranah komunikasi, analisis framing banyak digunakan untuk membedah cara – cara atau ideology media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Alex Sobur, 2009:162).

Sebagai contoh pada awal kepemimpinan Anies-Sandi sempat menjadi polemik dimasyarakat luas ialah penggunaan kata ‘pribumi’ dalam pidato politik yang dilakukan oleh gubernur terpilih Anies Baswedan pada 16 Oktober 2017 lalu di Balai Kota. Media online *Kompas.com* memberitakan bahwa penggunaan kata pribumi dilarang, hal itu berlaku karena ada undang-undang dan instruksi presiden yang mengatur tentang pelarang penggunaan kata pribumi dan keturunan.

Hal berbeda justru diberitakan oleh *Republika.co.id*, dalam pemberitaannya penggunaan kata pribumi yang dilontarkan oleh Anies Baswedan dalam pidatonya sudah sesuai dengan konteksnya dan tidak semestinya dipermasalahkan. Dari dua pemberitaan dua media tersebut tentu menarik untuk diteliti bagaimana media mengkonstruksi sebuah realitas yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda satu sama lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti, maka peneliti menganggap bahwa penelitian terkait dengan analisis *framing* dengan melibatkan dua atau lebih media dalam melihat suatu konteks berita dengan sudut pandang berbeda tetapi memiliki suatu kesamaan tema berita menjadi layak untuk dijadikan sebuah penelitian lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

“Konstruksi Berita Pasca Pelantikan Gubernur Baru Dki Jakarta Anies Baswedan – Sandiaga Uno Periode 2017 – 2022 (Analisis *Framing* Pada Media Online *Kompas.com*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id*)”

1.3 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana cara media online *Kompas.com*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id* dalam membingkai berita pasca pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022?
2. Bagaimana media online *Kompas.com*, *Detik.com* dan *Republika.co.id* dalam memberitakan pasca pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pastilah memiliki tujuan, dimana tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara media online *Kompas.com*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id* dalam membingkai berita pasca pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022
2. Untuk mengetahui bagaimana media online *Kompas.com*, *Detik.com* dan *Republika.co.id* dalam memberitakan pasca pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.2 Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini kelak, semoga dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian lainnya terutama yang berkaitan dengan analisis media massa menggunakan analisis *framing*. Serta diharapkan mampu memberikan kontribusi pada perluasan serta pengembangan keilmuan komunikasi.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini mempunyai kegunaan praktis bagi para pelaku media. Diharapkan bisa memiliki peran kontrol terhadap pemberitaan di media massa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tujuan dari adanya tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian adalah untuk menguraikan setiap variabel oleh peneliti sehingga tujuan dari sebuah penelitian dapat tercapai. Selain itu, memberikan batasan kepada penelitian, sehingga penelitian tersebut tetap berada pada jalur yang semestinya juga merupakan tujuan dari adanya tinjauan penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka tinjauan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.1 Komunikasi Massa Sebagai Media Penyampaian Informasi

Komunikasi massa adalah proses dimana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas, pada sisi lain diartikan sebagai bentuk komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak maupun elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Ardianto, 2004:31). Dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan diatas bahwa komunikasi massa memiliki peranan untuk menyebarluaskan informasi kepada publik yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga berita melalui media cetak ataupun media elektronik.

Media massa juga menjadi media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan informasi yang terbuka dan jujur dan benar disampaikan media massa kepada masyarakat, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kaya dengan informasi, masyarakat yang terbuka dengan informasi, sebaliknya pula masyarakat akan menjadi masyarakat informatif, masyarakat yang dapat menyampaikan informasi dengan jujur kepada media massa. Selain itu, informasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai masyarakat dunia yang dapat berpartisipasi dengan berbagai kemampuan (Burhan Bungin, 2006:85-86).

Severin dalam Ardianto (2004) menjelaskan bahwa komunikasi massa pada intinya merupakan komunikasi yang menggunakan saluran (media) untuk menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal, bertempat tinggal jauh, heterogen, anonim, dan menimbulkan efek-efek tertentu. Dalam komunikasi massa terdapat beberapa sifat yang melekat, juga sekaligus yang membedakannya dengan komunikasi yang lainnya (Ardianto, 2004:32). Maksudnya adalah komunikasi massa melalui sebuah media dapat menghubungkan komunikator dan komunikan yang bertempat tinggal jauh sehingga penyampaian informasi dapat tersampaikan secara merata.

Burhan Bungin (2006:79) menjelaskan terdapat 5 fungsi komunikasi massa, yaitu pengawasan, *social learning*, penyampaian informasi, transformasi budaya, dan hiburan. Lebih lanjut yang dimaksud fungsi komunikasi sebagai penyampaian informasi adalah komunikasi massa memungkinkan informasi dari institusi publik tersampaikan kepada masyarakat secara luas dalam waktu cepat

sehingga sehingga fungsi informatif tercapai dalam waktu cepat dan singkat. Oleh karenanya komunikasi massa memiliki fungsi dalam hal penyampaian informasi kepada publik dengan waktu yang cepat dengan cakupan wilayah yang luas sehingga masyarakat dapat menerima informasi yang diberikan dalam tempo yang cepat dan tepat.

2.2 Media Online Sebagai Media Massa

Media *online* yaitu media internet, seperti *website*, blog, dan lainnya yang terbit atau tayang di dunia maya, dapat dibaca dan dilihat di internet. Media *online* merupakan pemain baru dalam kancah pers Indonesia, menurut beberapa sumber media *online* di Indonesia telah tumbuh sejak tahun 1994. (Syarifudin Yunus, 2010:27). Kemudahan akses internet yang berkembang pesat belakangan ini serta dengan dimudahkannya pembaca untuk mengakses segala informasi berita melalui gawai yang mereka punya menjadikan media *online* sebagai hal yang baru, padahal seperti dilansir melalui <https://inside.Kompas.com/about-us>, *Kompas.com* pertama kali muncul pada tahun 1995 dengan domain *kompas.co.id*.

Media *online* (*online media*) disebut juga *cybermedia* (media siber), *internet media* (media internet), dan *new media* (media baru) dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Media *online* dapat dikatakan sebagai media “generasi ketiga” setelah media cetak (*printed media*)-koran, tabloid, majalah, buku, dan media elektronik (*electronic media*)-radio televisi, film/video. (Romli, 2012:30). Seiring perkembangannya saat ini, media *online* tidak hanya dapat diakses melalui *website* saja, banyak dari

perusahaan media massa telah menyediakan aplikasi perangkat lunak untuk memudahkan membaca berita tanpa harus mengaksesnya melalui *browser*. *Kompas.com* misalnya, telah membuat aplikasi portal berita bernama “*Kompas.com*” yang dapat diunduh melalui *playstore* maupun *app store*, sehingga pembaca hanya perlu mengakses melalui aplikasi yang tersedia dengan konten yang sama seperti pada versi web.

Tabel 2.1 Perbedaan Teknis Media Cetak dengan Media Online

Unsur	Media Cetak	Media Online
Pembatasan panjang naskah	Biasanya panjang naskah dibatasi, misalnya 5 hingga 7 halaman kuarto diketik 2 spasi	Tidak ada pembatasan panjang naskah, karena halaman web bisa menampung naskah sepanjang apapun. Namun demi alasan kecepatan akses, keindahan desain dan alasan-alasan teknis lainnya, perlu dihindarkan naskah yang terlalu panjang
Prosedur naskah	Naskah biasanya harus di ACC oleh redaksi sebelum dimuat.	Sama saja. Namun ada sejumlah media yang memperbolehkan wartawan di lapangan yang telah dipercaya untuk meng-upload sendiri tulisan-tulisan mereka
Editing	Kalau sudah naik cetak (atau harus di-film-kan pada proses percetakan), tak bisa dicetak lagi.	Walau sudah online, masih bisa diedit. Tapi, biasanya editing hanya mencakup masalah-masalah teknis, seperti merevisi salah ketik dan seterusnya.
Tugas desainer dan layouter	Tiap edisi, desainer atau layouter harus tetap bekerja untuk menyelesaikan desain pada edisi tersebut.	Desainer dan programmer cukup bekerja sekali saja, yakni diawal pembuatan situs web. Selanjutnya, tugas

		mereka hanya pada masalah-masalah maintenance atau ketika perusahaan memutuskan untuk mengubah desain dan sebagainya. Setiap kali redaksi meng-upload naskah, naskah itu akan langsung “masuk” ke desain secara otomatis.
Jadwal terbit	Berkala (harian, mingguan, bulanan, dua mingguan dan seterusnya).	Kapan saja bisa, tidak ada jadwal khusus, kecuali untuk jenis-jenis tulisan/rubrik tertentu.
Distribusi	Walau sudah selesai dicetak, media tersebut belum bisa langsung dibaca oleh khalayak ramai sebelum melalui proses distribusi.	Begitu di-upload setiap berita dapat langsung dibaca oleh semua orang di seluruh dunia yang memiliki akses internet.

Sumber: Jurnalistik Suatu Pengantar (Indah Suryawati: 2011)

2.3 Objektivitas Berita Dalam Media Massa

Objektivitas pada umumnya berkaitan dengan berita dan informasi. Objektivitas merupakan nilai sentral yang mendasari disiplin profesi yang dituntut oleh para wartawan. Dengan demikian objektivitas diperlukan untuk mempertahankan kredibilitas (McQuail, 1987:129). McQuail (2011:222) juga mengatakan bahwa objektivitas adalah bentuk tertentu dari praktik media dan juga merupakan sikap tertentu dari tugas pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi.

Ciri utama dan objektivitas adalah penerapan posisi keterlepasan dan netralitas terhadap objek peliputan. Kedua, terdapat upaya menghindari keterlibatan: tidak terlibat dalam perselisihan atau menunjukkan bias. Ketiga,

objektivitas membutuhkan keterikatan yang kuat terhadap akurasi dan jenis kebenaran media yang lain. Konsep objektivitas juga mengasumsikan tidak adanya agenda tersembunyi atau layanan dari pihak ketiga.

Objektivitas dapat diukur dengan menggunakan indicator-indikator yang merupakan perincian dari dua dimensi yang digunakan yaitu dimensi faktualitas dan dimensi ketidakberpihakan. Dimensi faktualitas merujuk kepada, pertama pada bentuk peliputan yang berkaitan dengan peristiwa dan pernyataan yang dapat diperiksa terhadap sumber dan ditampilkan bebas dari komentar atau setidaknya dipisahkan dari komentar apapun. Faktualitas melibatkan beberapa kriteria kebenaran yang lain, yaitu keutuhan laporan, akurasi, dan niat untuk tidak menyesatkan atau menyembunyikan hal yang relevan. Aspek yang kedua dari faktualitas adalah relevansi. Konsep ini berkaitan dengan proses seleksi, alih-alih kepada bentuk presentasi dan mensyaratkan pemilihan itu terjadi menurut prinsip yang jelas dan koherensi dari apa yang penting bagi penerima yang dituju dan tau bagi masyarakat. Dimensi yang kedua adalah ketidakberpihakan, yang dapat dilihat dari netral dan seimbang. Ketidakberpihakan merupakan sikap netral dan harus diraih melalui kombinasi keseimbangan (penekanan waktu, tempat yang sama, proporsional) diantara penafsiran, sudut pandang peristiwa yang saling berlawanan dan netralitas dalam penyajian.

Secara umum khalayak media terlihat memahami prinsip kinerja objektif dengan baik dan praktiknya membantu meningkatkan kepercayaan public dan kebenaran baik dalam informasi dan juga opini yang ditawarkan media. Media itu sendiri menemukan bahwa objektivitas memberikan nilai pasar yang lebih luas

dan tinggi bagi produk berita mereka. Akhirnya, karena standar objektivitas memiliki nilai yang sangat luas, ia sering kali digunakan dalam klaim dan penyelesaian yang menyangkut bias dan perlakuan yang tidak adil. Objektivitas akan mengarah kepada kualitas informasi. Persyaratan utama untuk kualitas informasi adalah sebagai berikut:

1. Media massa harus menyediakan pasokan yang menyeluruh atas berita yang relevan serta latar belakang informasi mengenai peristiwa yang terjadi dimasyarakat dan sekeliling dunia.
2. Informasi harus objektif dalam artian memiliki bentuk yang factual, akurat, jujur, utuh, dan jujur terhadap realitas, dan dapat diandalkan dalam artian dalam diperiksa dan memisahkan antara fakta dengan opini.
3. Informasi harus berimbang dan adil (tidak memihak), melaporkan sudut pandang alternative dan penafsiran dengan cara dan sedapat mungkin tidak sensasional dan tidak bias (dikutip dari skripsi milik Dewi Rubiyanti (2013) <http://repository.fisip-untirta.ac.id/527/>)

2.4 Teori Framing

Framing secara sederhana adalah membingkai sebuah peristiwa. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2004: 161). Cara pandang tersebut yang pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan bagian mana yang dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Sobur, 2004: 162). Berdasarkan

pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa wartawan lah yang mempunyai peranan terhadap sebuah peristiwa, hasil tulisan masing-masing wartawan akan berbeda satu sama lain hasilnya meskipun dihadapkan pada peristiwa atau isu yang sama.

Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Nugroho, Eriyanto, Surdiasis, 1999:21).

Framing merupakan sebuah cara untuk melihat lebih detail bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa (Eriyanto, 2012:77). Disini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak. Framing membuat dunia lebih diketahui dan dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu (Eriyanto, 2012:77).

Dalam penelitian ini misalnya, peneliti menggunakan tiga buah media sebagai bahan yang akan diteliti tentu saja dari ketiga berita yang dimuat masing media massa yang ditampilkan akan mempunyai hasil yang berbeda meskipun tema yang diberitakan terlihat sama. Sebagai contoh, penggunaan kata 'pribumi'

dalam pidato pelantikan Anies-Sandi, *Kompas.com* dan *tempo.co* sama-sama memberitakan bahwa penggunaan kata ‘pribumi’ merupakan sebuah kesalahan dan tidak semestinya digunakan, sedangkan hal berbeda justru diberitakan oleh *Detik.com* yang justru memberitakan penggunaan kata ‘pribumi’ tidak menjadi masalah. Hal tersebut menunjukkan, wartawan memegang peranan terhadap hasil dari suatu berita dan wartawan pula lah yang menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan bagian mana yang dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut.

Di sini terlihat, bagaimana sebuah peristiwa yang sama mampu ditafsirkan berbeda dengan tampilan yang berbeda pula tentunya. Perbedaan itu terjadi karena peristiwa tersebut dipahami dan dibingkai secara berbeda oleh media. Ada dua esensi utama dari framing tersebut. **Pertama**, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan bagian mana yang tidak diliput. **Kedua**, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan (Eriyanto, 2012:11).

Pada dasarnya framing adalah metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. “Cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas (Eriyanto, 2012:10-11). Artinya framing dipandang sebagai suatu cara bagaimana media melihat sebuah peristiwa,

tentu saja hasil akhir dari sebuah realitas yang terjadi akan berbeda karena adanya perbedaan dalam “cara melihat” peristiwa dari masing-masing media.

Framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni: *problem identification* (**identifikasi masalah**) yaitu peristiwa dilihat dari sebagai apa dengan nilai positif atau negatif apa; *casual interpretation* (**identifikasi penyebab masalah**) yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; *moral evaluation* (**evaluasi moral**) yaitu penilaian atas sebab masalah; dan *treatment recommendation* (**penanggulangan masalah**) yaitu menawarkan suatu cara penanggulangan masalah dan kadang kala memprediksi hasilnya (Alex Sobur, 2004: 172-173).

Untuk lebih jelasnya bagaimana teknik framing ini digunakan oleh media, peneliti akan memaparkannya lebih lanjut dalam bab pembahasan nanti. Bagaimana penggunaannya terhadap analisis media terutama dalam hal ini berita, dan menggunakan model analisis framing siapa yang digunakan peneliti dalam meneliti pemberitaan mengenai pasca dilantiknya gubernur baru DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada tiga media yang akan diangkat menjadi bahan penelitian.

2.5 Model Framing Robert N. Entman

Robert N. Entman menggunakan konsep framing untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu

sendiri dapat didefinisikan yaitu membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Informasi yang menonjol lebih terasa dan tersimpan dalam benak khalayak dibandingkan dengan informasi yang disajikan secara biasa, karena khalayak memiliki pandangan apa yang dia pikirkan atau suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikirannya (Eriyanto, 2002:220).

Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan/dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan ini sendiri dapat didefinisikan untuk membuat informasi lebih jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu (Eriyanto, 2012:20).

Frame berita timbul dalam dua level, pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. Frame berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, symbol, citra yang ada dalam narasi berita (Eriyanto, 2002:224).

Entman dalam (Eriyanto:2002) melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu. Seleksi isu, aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta, dari realitas yang kompleks dan beragam itu, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang di masukkan (*included*), tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (*excluded*).

Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu.

Penonjolan aspek, aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari isu tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Tabel 2.4 Elemen Framing Robert N. Entman

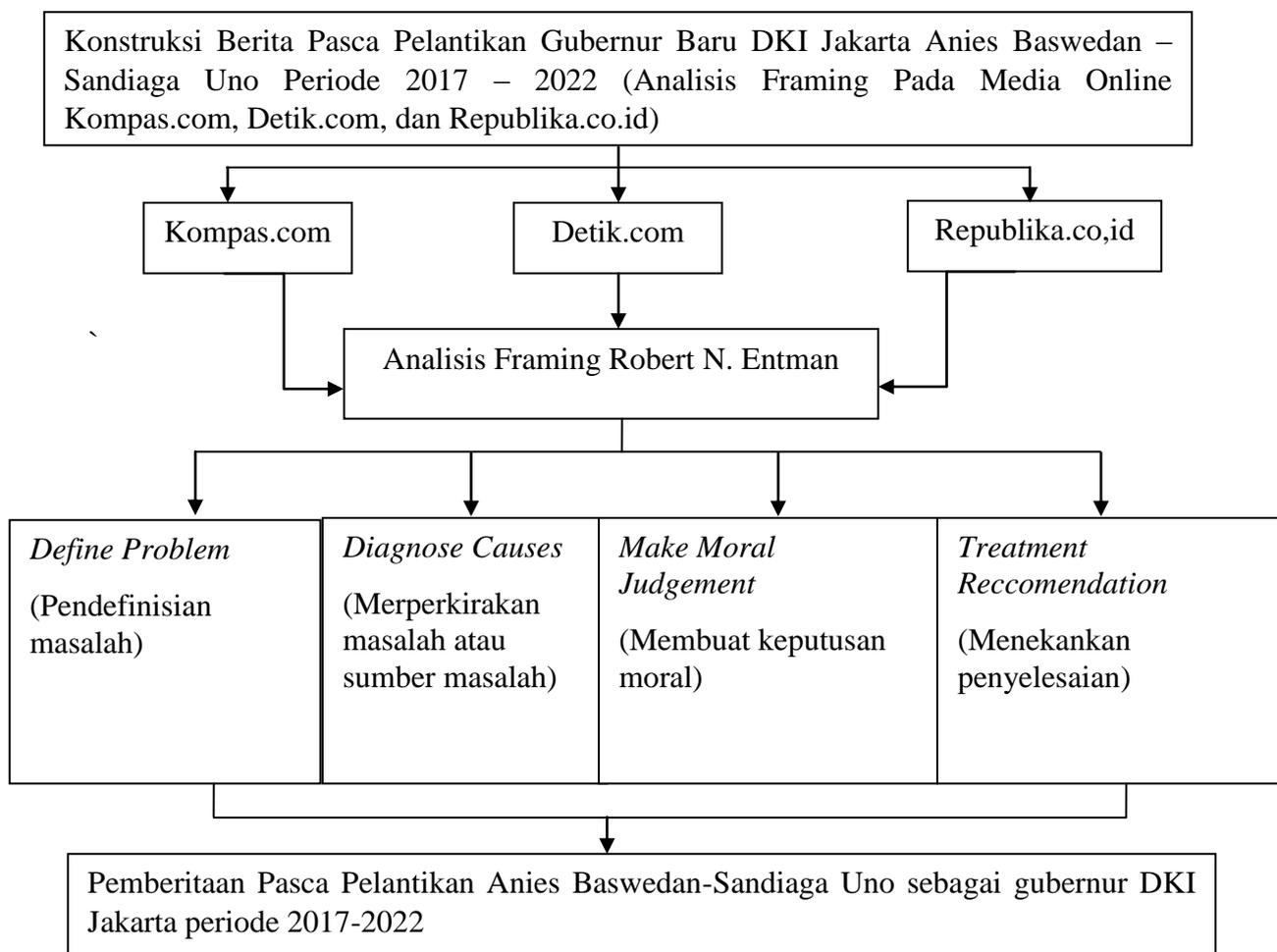
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian masalah)	Elemen framing untuk melihat bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Merperkirakan masalah atau sumber masalah)	Elemen framing untuk melihat peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (actor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Elemen ini untuk melihat nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendeligitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Elemen framing ini melihat penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: Eriyanto, 2007. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah fondasi dari sebuah penelitian yang akan dilakukan dan biasanya kerangka berpikir atas teori-teori yang berhubungan dengan faktor yang diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka kerangka berpikir terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam membedah sebuah konstruksi berita terkait sebuah peristiwa akbar berita pasca pelantikan gubernur baru DKI Jakarta yang dilakukan oleh media online *Kompas.com*, *Detik.com* dan *Republika.co.id* ialah sebagai berikut:

Gambar 2.1



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Sifat dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya pula. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling. Bahkan, populasi dan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka peneliti tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data, bukan banyaknya (kuantitas) data (Rachmat Krisyantono, 2010:266). Berbeda dengan jenis penelitian kuantitatif yang lebih mengutamakan jumlah sampling, pada penelitian kualitatif ini peneliti tidak perlu sibuk menghitung berapa jumlah sample yang akan digunakan dalam penelitiannya, cukup mengacu kepada kualitas data yang telah diperoleh sebelum akhirnya dapat dilakukan penelitian.

Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi, suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu) lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif lebih lanjut mementingkan proses dibandingkan hasil akhir. Oleh karena itu urutan-urutan kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyak

gejala-gejala yang ditemukan. Penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan untuk mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif serta menggambarkan, meringkaskan, berbagai kondisi, situasi dan fenomena yang ada di masyarakat dan menjadi objek penelitian (Bungin, 2013: 68).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian untuk menggambarkan secara akurat mengenai kenyataan, bukti-bukti, sifat-sifat mengenai objek yang diteliti, serta menganalisa hubungan antarfenomena yang diselidiki. (Moleong, 2004). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara gamblang kepada publik bagaimana media massa merekonstruksi suatu realitas kemudian menjadi isu yang layak diperbincangkan khalayak ramai meskipun dihadapkan pada sebuah situasi yang sama tetapi hasil dari pemberitaan media massa yang akan dilakukan dalam penelitian kali ini akan berbeda.

3.2 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian analisis isi. Analisis isi diartikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik referensi dari isi yang ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis dan dilakukan secara objektif dan reliable (Eriyanto, 2011:15). Artinya analisis ini digunakan untuk membedah segala unsur yang terdapat dalam sebuah konteks, mulai dari isi, gambar, kalimat dll yang terdapat dalam suatu isi teks media massa.

Analisis isi banyak dipakai dalam lapangan ilmu komunikasi. Penggunaannya pun sering dipakai untuk menganalisis isi media cetak maupun elektronik. Diluar itu, analisis isi juga sering dipakai untuk mempelajari semua konteks komunikasi baik komunikasi antarpribadi, kelompok, ataupun organisasi. Asalkan terdapat dokumen yang tersedia, analisis isi dapat diterapkan (Eriyanto, 2011:10).

Menurut Holsti (1969) dalam buku Eriyanto (2011:33) menjelaskan bahwa fokus analisis isi digunakan untuk menggambarkan karakteristik pesan, yaitu (menjawab pertanyaan *what, how, to where*) dan menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan (menjawab pertanyaan *why, with what effect*). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penggunaan analisis isi ada untuk membedah tiap-tiap konteks yang terdapat pada sebuah media massa, baik cetak, elektronik maupun siber lebih mendalam.

Peneliti tidak akan menjabarkan lebih lanjut tentang analisis isi, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis framing sebagai pisau penelitian, dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa analisis framing pendekatan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2004:161).

3.3 Instrumen Penelitian

Kriyantono (2010) menjelaskan instrumen penelitian adalah sebuah alat ukur untuk mengukur data di lapangan. Alat ukur adalah alat bantu yang

menentukan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam mengumpulkan data. Alat ukur ini sangat penting untuk mencari data dengan membatasi kebenaran dan ketepatan indikator variable yang sudah ditetapkan dari data di lapangan, sehingga data yang terkumpul adalah sesuai dengan masalah dan tidak meluas.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrument peneliti harus divalidasi, seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif. Penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2008:222).

3.4 Unit Analisis

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan focus. Spradley menyatakan bahwa focus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi social. Dalam penelitian kualitatif, penentuan focus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi social (Sugiyono, 2008:209).

Terdapat 15 berita yang dijadikan sebagai unit analisis dalam penelitian. Ke-15 berita tersebut terbagi masing menjadi 5 berita dalam setiap media online yang menjadi objek penelitian. Berikut adalah tabel unit yang akan peneliti analisis dalam penelitian ini:

Tabel 3.1
Berita Media Onlie *Kompas.com*

Tanggal Terbit	Judul Berita
Rabu, 18 Oktober 2017	Polemik Kata 'pribumi' di Awal Kepemimpinan Anies Baswedan
Jumat, 19 Desember 2017	Penataan PKL Tanah Abang "Out Of The Box", tapi Banyak yang Dilanggar
Selasa, 09 Januari 2018	"OK OCE Ini Pelatihan Paling Aneh, Ini Pelatihan Cuap-cuap..."
Kamis, 18 Januari 2018	Masa Depan Becak di Jakarta dalam Kontrak Politik Anies-Sandi...
Senin, 15 Januari 2018	Kembalinya Sepeda Motor Melintas di Thamrin yang Menuai Pro Kontra...

Tabel 3.2
Berita Media Onlie *Detik.com*

Tanggal Terbit	Judul Berita
Rabu, 18 Oktober 2017	Anies Dilaporkan soal Pidato Pribumi, Sandiaga: Nggak Ada Komentar
Sabtu, 23 Desember 2017	Penataan Tanah Abang, Anies: Semuanya Sesuai Aturan
Selasa, 09 Januari 2018	OK OCE Disebut Hanya Cuap-Cuap, Sandi: Pelatihan Memang Seperti Itu
Rabu, 17 Januari 2018	Soal Pengoperasian Becak, Sandi: Ada Kontrak Politik, Kita Tunaikan
Rabu, 10 Januari 2018	Ungkapan Senang Para Rider Ketika Boleh Melintas Lagi di Jl Thamrin

Tabel 3.3
Berita Media Onlie *Republika.co.id*

Tanggal Terbit	Judul Berita
Rabu, 18 Oktober 2017	ACTA Siap Bela Anies Soal Pidato 'pribumi'
Sabtu, 23 Desember 2017	Penataan Tanah Abang Berdayakan PKL, Muliakan Pejalan
Selasa, 09 Januari 2018	Program Pelatihan OK OCE Dikritik, Ini Jawaban Santai Sandi
Selasa, 16 Januari 2018	Fakta: Becak Transportasi Ramah Lingkungan
Jumat, 12 Januari 2018	MA: Larangan Sepeda Motor Melintas Langgar HAM

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian, cara-cara yang dilakukan penelitian untuk menganalisis penelitian yang sedang dilakukan guna untuk mendapatkan hasil yang relevan. Beragam cara yang dapat dilakukan peneliti dalam pengumpulan data, Teknik pengumpulan data bergantung pada metodologi penelitian yang digunakan yaitu kualitatif atau kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, *focus group discussion*, wawancara, dokumentasi, dan studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan studi dokumen sebagai sumber utama data penelitian.

Berdasarkan unit analisis yang telah diperoleh, maka dalam teknik pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh melalui media

online *Kompas.com*, *Detik.com*, dan *tempo.co*. Supaya tidak terlalu melebar dari penelitian yang dilakukan, maka data yang dikumpulkan hanya sampai pada 100 hari setelah pelantikan Anies-Sandi.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam jategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa. Analisis data merupakan hal yang kritis dalam penelitian kualitatif, analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono: 2007).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis *framing* model Robert N. Entman, yang terdiri dari *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Peneliti menggunakan bagan pada seperti di bawah ini dalam menganalisis penelitian;

Judul Berita:

Edisi/Tanggal:

Tabel 3.4 Analisis Data

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	
<i>Diagnose Causes</i>	
<i>Make Moral Judgement</i>	
<i>Treatment Recommendation</i>	

3.7 Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, beragam cara yang dapat dilakukan untuk menguji keabsahan data. Keabsahan dalam sebuah penelitian diperlukan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Untuk keabsahan data pada penelitian ini, peneliti akan melampirkan semua berita yang menjadi objek penelitian dan melampirkan data yang diperoleh oleh peneliti dalam melakukan penelitian

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.5

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Oktober 2017	November 2017 – Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018
1.	Prapenelitian					
2.	Penyusunan Bab I-III					
3.	Sidang Outline					
4.	Revisi Bab I-III					
5.	Penyusunan Bab IV					
6.	Penyusunan Bab V					
7.	Sidang Skripsi					

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi dan Objek Penelitian

Kompas.com

Kompas.com adalah salah satu pionir media online di Indonesia, ketika pertama kali hadir di Internet pada 14 September 1995 dengan nama *Kompas Online*. Mulanya, *Kompas Online* atau KOL yang diakses dengan alamat *kompas.co.id* hanya menampilkan replika pada berita-berita harian *Kompas* yang terbit hari itu. Tujuannya adalah memberikan layanan kepada para pembaca harian *Kompas* di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi *Kompas*. Dengan hadirnya *Kompas Online*, para pembaca harian *Kompas* terutama di Indonesia bagian timur dan luar negeri dapat menikmati harian *Kompas* hari itu juga, tidak perlu menunggu beberapa hari seperti biasanya (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:15 WIB, diambil dari <https://inside.Kompas.com/about-us>).

Selanjutnya, demi memberikan layanan yang maksimal, di awal tahun 1996 alamat *Kompas Online* berubah menjadi *www.Kompas.com*. Dengan alamat baru, *Kompas Online* menjadi semakin populer buat para pembaca setia harian *Kompas* di luar negeri. Melihat potensi dunia digital yang besar, *Kompas Online* kemudian dikembangkan menjadi sebuah unit bisnis tersendiri di bawah bendera PT *Kompas Cyber Media (KCM)* pada

6 Agustus 1998. Sejak saat itu, Kompas Online lebih dikenal dengan sebutan KCM. Di era ini, para pengunjung KCM tidak lagi hanya mendapatkan replika harian Kompas, tapi juga mendapatkan update perkembangan berita-berita terbaru yang terjadi sepanjang hari (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:15 WIB, diambil dari <https://inside.Kompas.com/about-us>).

Pengunjung KCM meningkat pesat seiring dengan tumbuhnya pengguna Internet di Indonesia. Mengakses informasi dari Internet kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita sehari-hari. Dunia digital pun terus berubah dari waktu ke waktu. KCM pun berbenah diri. Pada 29 Mei 2008, portal berita ini me-rebranding dirinya menjadi *Kompas.com*, merujuk kembali pada brand Kompas yang selama ini dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberi makna. Kanal-kanal berita ditambah. Produktivitas sajian berita ditingkatkan demi memberikan sajian informasi yang update dan aktual kepada para pembaca. Rebranding *Kompas.com* ingin menegaskan bahwa portal berita ini ingin hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas kebenarannya (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:15 WIB, diambil dari <https://inside.Kompas.com/about-us>).

Detik.com

Detikcom dibidani Agronet Multicitra Siberkom (Agrakom), yang berdiri sejak Oktober 1995. Nama Agrakom penting disebut, karena perusahaan penyedia jasa konsultasi, pengembangan, dan pengelolaan web ini punya peran dalam pengembangan beberapa situs media besar di Indonesia saat itu (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:20 WIB, diambil dari <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>).

Berbeda dengan media daring yang tayang sebelumnya, Detikcom (*Detik.com*) lahir bukan oleh media yang sudah terbit dalam versi cetak. Penggagasnya adalah empat sekawan di balik Agrakom: Budiono Darsono, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadhi. Tayang untuk pertama kalinya pada 9 Juli 1998 (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:20 WIB, diambil dari <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>).

Uniknya, konsep awal Detikcom sempat ditawarkan kepada media lain yang merupakan klien Agrakom. Menurut penuturan Abdul Rahman, konsep yang digagas Budiono Darsono itu adalah sebuah media baru yang mengoptimalkan internet, mampu memberikan informasi secepat mungkin, tak seperti koran yang harus ditulis, disunting, dan dicetak sebelum terbit (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:20 WIB, diambil dari <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>).

Abdul yang juga mantan wartawan Tempo, menyebutnya sebagai Timeline, penyajian berita bersambung ala breaking news stasiun televisi berita seperti CNN, atau yang biasa diterapkan pada kantor-kantor berita. Pemicu lain yang melahirkan Detikcom, adalah situasi sosial politik di Indonesia pada 1998 yang sedang panas. Gerakan Reformasi yang juga dipantau media internasional, menjadi sumber berita yang nyaris tak ada habisnya. Budiono, sebelumnya pewarta di Tabloid Detik, tergugah untuk membuat laporan cepat lewat internet (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:20 WIB, diambil dari <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>).

Budiono dkk pun mengeksekusi sendiri gagasan tersebut. Situs beralamat di *Detik.com* inipun muncul dengan format berita baru. Dalam ingatan para pendiri, Budiono menulis berita yang bersumber dari televisi, atau dari siaran radio agar Detikcom bisa terbit. Jika Budiono sedang keluar kantor, maka Detikcom tidak bisa memperbarui beritanya. (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:20 WIB, diambil dari <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>).

Demi kecepatan menerbitkan berita, Detikcom kemudian memang tidak selalu mengikuti pakem baku jurnalistik, melengkapi berita dengan unsur 5W + 1H. Cukup dengan 3W: What, When, dan Where, informasi disajikan untuk pembaca. Pemutakhiran informasi dilakukan melalui artikel berikutnya. Namun konsep inilah yang membuat Detikcom saat itu

melenggang nyaris tanpa saingan. Masih menurut Abdul Rahman, Detikcom sempat melewati rekor kunjungan situs Kompas Online pada Agustus 1999 (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:20 WIB, diambil dari <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>).

Dalam catatan Kompas, sebulan setelah Detikcom tayang di internet, kunjungannya mencapai 15.000 klik per hari. Satu tahun kemudian, jumlah pembacanya melesat menjadi 50.000. Pencapaian yang luar biasa mengingat jumlah pengguna internet saat itu (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:20 WIB, diambil dari <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>).

Detikcom layak disebut sebagai pelopor media daring di Indonesia, bahkan di dunia. Capaian tersebut tak mungkin diabaikan dari catatan sejarah perkembangan media daring Indonesia (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:20 WIB, diambil dari <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>).

Republika.co.id

Republika hadir tidak lepas dari peran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang saat itu diketuai oleh BJ Habibie. Republika terbit pertama kali pada tanggal 4 Januari 1993, kini Republika semakin

professional dan matan sebagai koran berskala nasional untuk komunitas muslim di Indonesia.

Republika Online (ROL) muncul dua tahun setelah Harian Republika terbit, yakni tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1995. ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video yang terbentuk berdasarkan teknologi hypermedia dan hiperteks. (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 12:00 WIB, diambil dari <https://www.Republika.co.id/page/about>).

Republika Online diterbitkan menyambut era konvergensi media saat itu. Populernya internet, meski masih terbatas, menyebabkan konten media tak melulu hanya teks dan foto, namun bisa mencakup multi media. Republika, tak mau ketinggalan dalam perkembangan tersebut (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:20 WIB, diambil dari <https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>).

Media daring yang diresmikan peluncurannya oleh Presiden ke-2 RI, Suharto, ini juga ingin menjangkau pembacanya di mancanegara. Republika mengklaim, pembaca dari Malaysia dan Arab Saudi sudah menjadikannya sebagai rujukan seputar berita Islam di Indonesia. Karenanya, mereka mengincar pembaca yang lebih luas (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 10:20 WIB, diambil dari

<https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>).

Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya. Selain menyajikan informasi, ROL juga menjadi rumah bagi komunitas. ROL kini juga hadir dalam versi English (diakses pada hari Selasa, 10 Juli 2018 pukul 12:00 WIB, diambil dari <https://www.Republika.co.id/page/about>).

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah analisis framing pada semua judul yang berkaitan dengan konstruksi berita pasca pelantikan gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno periode 2017-2022 pada tiga objek media siber yang menjadi objek penelitian ini. Terdapat 15 berita yang menjadi topik yang akan diteliti dengan masing-masing 5 berita pada tiap-tiap media siber yakni *Kompas.com*, *Detik.com* dan *Republika.co.id*. Analisis framing yang digunakan adalah model analisis framing Robert N. Entman, berikut analisisnya.

4.2.1 Analisis Framing Pemberitaan *Kompas.com*

4.2.1.1 Judul Berita: “Polemik Kata ‘Pribumi’ di Awal Kepemimpinan Anies Baswedan”

Edisi/Tanggal: 18 Oktober 2017, pukul 08:44 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.1 Hasil Analisis Berita 1

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Polemik penggunaan kata ‘pribumi’
<i>Diagnose Causes</i>	Penggunaan kata ‘pribumi’ yang dianggap melanggar UU No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.
<i>Make Moral Judgement</i>	Mengganti istilah ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’ menjadi ‘warga negara Indonesia’
<i>Treatment Recommendation</i>	Pelaporan ke Bareksrim Polri

Define Problems

Kompas.com dalam beritanya yang berjudul “Polemik kata ‘pribumi’ di Awal Kepemimpinan Anies Baswedan” pada edisi 18 Oktober 2017 lalu, membuat dengan mengidentifikasikan kata ‘pribumi’ menjadi polemik bagi gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan. Kata ‘pribumi’ muncul saat Anies Baswedan melakukan pidato politiknya pertamanya dihadapan para warga pasca dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kata ‘pribumi’ menjadi polemik lantaran dianggap melanggar UU nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. Keesokan harinya, Anies Baswedan menjelaskan bahwa kata ‘pribumi’ yang digunakannya dalam pidato politiknya merujuk pada era penjajahan di masa lalu karena menurutnya Jakarta adalah kota yang paling merasakan penjajahan Belanda di Indonesia.

Diagnose Cause

Dalam berita yang dirilis oleh *Kompas.com* pada 18 Oktober 2017 tersebut yang menjadi sumber masalah adalah penggunaan kata ‘pribumi’ yang digunakan oleh gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidato politiknya di hadapan para warga tanggal 16 Oktober 2017 dianggap melanggar UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis dan melanggar Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengingatkan bahwa ada Undang-undang dan Instruksi Presiden yang melarang penggunaan kata ‘pribumi’ dan ‘keturunan’.

Sumarsono mengatakan, aturan tersebut berlaku untuk semua warga dan pejabat negara.

"Semua pejabat negara dan kita warga bangsa, hindari pakai istilah pribumi, itu UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis," ujar Sumarsono ketika dihubungi, Selasa."

Make Moral Judgement

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan bahwa pelarangan penggunaan kata 'pribumi' sudah diatur dalam UU no. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain UU tersebut, pelarangan penggunaan kata 'pribumi' juga diatur dalam Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998. Sehingga, menurutnya kata 'pribumi' dan "non-pribumi" diganti dengan 'Warga Negara Indonesia'.

"Sumarsono mengatakan, penggunaan kata pribumi dan non-pribumi diganti dengan kata 'Warga Negara Indonesia'

Treatment Recommendation

Penggunaan kata 'pribumi' ternyata berbuntut pada dilaporkannya Anies oleh Banteng Muda Indonesia (BMI) yang merupakan sayap organisasi dari partai PDI-P. BMI melaporkan Anies pada hari Selasa malam (17/10/2017) setelah sebelumnya membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan laporan tidak diterima. BMI menyebut ucapan Anies melanggar UU No. 40 tahun 2008 dan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1998.

"BMI mulanya datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pada Selasa. Namun, laporan ini tidak diterima. Polda Metro Jaya mengarahkan BMI agar membuat laporannya di Bareskrim Mabes Polri."

Kepala Departemen Pidana Hukum dan HAM DPD Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta Pahala Sirait, melaporkan Anies Baswedan terkait isi dari sebagian pidato politik kemarin mengenai kata pribumi dan non-pribumi.

“Pahala menyebut ucapan Anies tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2008 dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998.”

4.2.1.2 Judul Berita: Penataan PKL Tanah Abang “Out Of The Box”, tapi Banyak

Yang Dilanggar

Edisi/Tanggal: 29 Desember 2017 pukul 17:01 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.2 Hasil Analisis Berita 2

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Pelanggaran penataan pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang
<i>Diagnose Causes</i>	Ditematkannya PKL di jalanan dan bukan mendorong pindah ke blok-blok yang disediakan.
<i>Make Moral Judgement</i>	Adanya dugaan malaadministrasi
<i>Treatment Recommendation</i>	<i>Kompas.com</i> memberikan solusi agar masyarakat tidak terburu-buru menilai terkait penataan PKL di Tanah Abang

Define Problems

Kompas.com mendefinisikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait penataan PKL di kawasan Tanah Abang

merupakan cara yang *out of the box* namun dinilai melanggar banyak ketentuan. Langkah *out of the box* yang dimaksud ialah dengan menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang di jalan, bukan mendorong para PKL tersebut menempati Blok G yang sudah dipersiapkan.

Langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersebut rupanya juga mendapat kritikan pedas dari Ombudsman. Ombudsman menilai langkah *out of the box* yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta terhadap penertiban PKL di Kawasan tanah abang terindikasi adanya maladministrasi, selain Ombudsman juga menilai banyak ketentuan yang dilanggar sehingga Ombudsman meminta Pemprov DKI Jakarta segera membereskan masalah hukumnya.

Diagnose Cause

Pada bagian ini *Kompas.com* mengidentifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap PKL Tanah Abang merupakan sebuah cara yang *out of the box* namun terlalu banyak ketentuan yang dilanggar oleh Pemprov DKI Jakarta. Ombudsman menilai diskresi mestinya diberlakukan untuk orang bukan kelompok PKL dan yang kedua diskresi bersifat temporer dan sementara, namun apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap PKL Tanah Abang bersifat jangka Panjang, sehingga Ombudsman menilai diskresi tidak dapat dilakukan kepada PKL Tanah Abang.

“Kalau dibilang diskresi, ada dua hal. Pertama, diskresi umumnya buat orang bukan kelompok PKL. Kedua, diskresi bersifat temporer dan sementara, ini bersifat jangka panjang. Apakah diskresi dapat dilakukan? Menurut kami kok tidak," tuturnya.”

Make Moral Judgement

Wakil Ketua Ombudsman RI, Adrianus Meliala, menilai bahwa ada kepentingan lain yang tidak diuntungkan bahkan cenderung dirugikan dengan adanya kebijakan penertiban tersebut, misalnya saja pemilik toko di kawasan tersebut. Selain adanya pihak yang dirugikan, Ombudsman juga melakukan investigasi terhadap lokasi yang potensial terdapat pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh peran Satpol PP DKI Jakarta.

Tanah Abang menjadi salah satu kawasan yang dinilai oleh Ombudsman sebagai daerah yang potensial adanya maladministrasi oleh Satpol PP DKI Jakarta. Hasil monitoring yang dilakukan oleh Ombudsman menunjukkan bahwa belum ada tindakan nyata dari Gubernur DKI dan Satpol PP DKI Jakarta terkait penertiban dan penataan PKL.

"Kami punya tiga jenjang, potensi malaadministrasi, indikasi, lalu baru malaadministrasi. Maka sementara di awal indikasinya potensi (malaadministrasi)," ujar Adrianus.

Adrianus juga menambahkan akan ada rapat serius untuk membuktikan yg potensi jadi indikasi dan mal.

"Makanya kami akan rapat pada Januari mendatang untuk apakah kita akan terus untuk kegiatan yang bersifat serius dalam hal ini untuk membuktikan yg potensi jadi indikasi dan mal. Kalau sudah maal kami boleh berikan rekomendasi," sambung dia.

Treatment Recommendation

Di lain kesempatan Wakil Gubernur Sandiaga Uno meminta agar masyarakat tak terlalu terburu-buru menilai. Karena kebijakan penataan

tersebut baru berjalan dua hari, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan 372 tenda yang dapat digunakan oleh para pedagang tanpa dipungut biaya retribusi di sepanjang jalan Jatibaru Raya tepat di depan stasiun Tanah Abang sepanjang 400 meter tersebut.

“Ini kan baru dua hari, masih panjang dan kita sabar melihatnya, dan kita beri kesempatan penataan ini akan tepat di hati masyarakat,” ujar Sandi.”

4.2.1.3 Judul Berita: "OK OCE Ini Pelatihan Paling Aneh, Ini Pelatihan Cuap-cuap..."

Edisi/Tanggal: 09 Januari 2018 pukul 14:22 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.3 Hasil Analisis Berita 3

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Kritik program OK OCE yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
<i>Diagnose Causes</i>	Hanya memberikan pelatihan lisan tanpa praktik
<i>Make Moral Judgement</i>	Pelatihan dianggap tidak siap
<i>Treatment Recommendation</i>	Menyediakan lokasi sementara (loksem) atau lokasi binaan (lokbin).

Define Problems

Kompas.com memberitakan kritikan OK OCE yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui pernyataan dari Anggota Komisi B DPRD

DKI Jakarta, Nur Afni Sajim. Afni menilai menyatakan pelatihan tersebut hanya pelatihan yang berbentuk lisan tanpa adanya praktik.

Selain itu, Afni juga mempertanyakan Pemprov DKI Jakarta yang memberikan pelatihan namun tidak memberikan lokasi sementara (loksem) atau lokasi binaan (lokbin) kepada peserta pelatihan OKE OCE. Atas dasar itulah, *Kompas.com* membuat framing melalui pernyataan Afni bahwa program OKE OCE yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta dinilai belum siap.

Diagnose Cause

Kritikan yang disampaikan oleh Afni bermula karena dirinya mengaku melihat dan menghadiri langsung pelatihan OKE OCE yang dilaksanakan di Jakarta Barat. Menurutnya pelatihan cenderung aneh, karena hanya memberikan pelatihan secara lisan tanpa adanya praktik. Afni melontarkan kritiknya pada saat melakukan rapat Komisi B bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI di Gedung DPRD DKI.

"Saya bingung, ini aneh, ini pelatihan paling aneh yang pernah saya datangi. (OK OCE) ini pelatihan cuap-cuap, Pak. Saya kontrol betul di Jakarta Barat," ujar Afni

Make Moral Judgement

Dalam polemik mengenai pelatihan OKE OCE yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta, *Kompas.com* melalui pernyataan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, menilai bahwa program

tersebut cenderung dipaksakan sehingga terlihat tidak siap dan memalukan.

“Jangan dipaksakan kalau memang itu tidak siap. Akhirnya, pelatihan itu memalukan kalau kata saya. Masih bagus anggota Dewan reses daripada pelatihan itu,” kata Afni.”

Treatment Recommendation

Kompas.com menawarkan solusi dengan memberikan lokasi sementara (loksem) ataupun lokasi binaan (lokbin) kepada peserta OK OCE untuk berwirausaha. Selain Dinas UMKM, menurut Afni, Dinas Perindustrian dan Energi serta Dinas Tenaga Kerja juga turut memberikan pelatihan program OKE OCE dengan praktik. Afni juga menambahkan dengan anggaran yang cukup besar lebih baik Dinas UMKM mengalokasikan anggaran tersebut untuk kebutuhan lain.

“Anggaran segitu banyak pelatihan, Dinas Energi (mengadakan) pelatihan, buat apa? Kenapa Bapak (Kepala Dinas UMKM Irwandi) enggak bikin loksem yang banyak, tampung semua (pedagang),” ucap anggota fraksi Demokrat-PAN itu”

4.2.1.4 Judul Berita: Masa Depan Becak di Jakarta dalam Kontrak Politik Anies-Sandi...

Edisi/Tanggal: 18 Januari 2018 pukul 07:58 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.4 Hasil Analisis Berita 4

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Kontrak politik becak di Jakarta
<i>Diagnose Causes</i>	Upaya dalam Anies-Sandi melunasi janji

	kontrak politik terkait beroperasinya becak di Jakarta
<i>Make Moral Judgement</i>	Menilai kontrak politik tersebut tidak membelunggu Anies-Sandi dalam membuat kebijakan
<i>Treatment Recommendation</i>	Kesinambungan janji politik dengan pemerintahan sebelumnya

Define Problems

Kompas.com membuat framing bahwa pengoperasian becak masuk kedalam janji kontrak politik yang dilakukan oleh Anies-Sandi. Kontrak politik tersebut diketahui ditandatangani oleh Anies saat dirinya masih berstatus sebagai calon gubernur. Dalam kontrak politik tersebut, pemilik becak dapat lebih leluasa dalam menawarkan jasanya.

Diagnose Cause

Kompas memberitakan bahwa nasib becak dalam kepemimpinan Anies-Sandi akan lebih leluasa beroperasi tapi tidak sepenuhnya leluasa karena becak hanya diperbolehkan beroperasi di jalan-jalan lingkungan dan tidak bisa masuk di jalan protocol maupun jalan besar lainnya. Kebijakan tersebut dapat dipahami karena dalam penataan becak, Anies terikat kontrak politik yang harus dilunasinya.

Make Moral Judgement

Kompas.com memberitakan bahwa dalam penataan becak ini merupakan janji politik Anies bersama Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu. Dalam kontrak yang ditandatangani saat Anies masih berstatus calon gubernur itu disebut bahwa Anies berjanji melindungi dan menata

ekonomi sektor informal seperti becak, PKL, dan nelayan. Anies menganggap bahwa kontrak politik yang dilakoninya tidak terbelenggu dalam mengambil sebuah kebijakan

“Tidak terbelenggu. Jadi janji itu adalah sesuatu yang ketika dibuat sudah dengan pertimbangan. Kami ketika menandatangani itu melihat mana yang bisa dikerjakan mana yang tidak bisa,” ujar Anies.

Treatment Recommendation

Kompas.com melalui pernyataan Sandiaga Uno menganggap becak ingin membangun kesinambungan dan kontinuitas dengan pemerintahan sebelumnya. Artinya, dalam hal becak ini Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama pernah membuat kontrak politik yang sama dengan Anies-Sandi

Kompas.com menambahkan, pada 2012 Joko Widodo yang dulu masih berstatus calon gubernur juga pernah membuat kontrak politik dengan warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru. Isi kontraknya tidak terlalu berbeda dengan kontrak yang disebut telah ditandatangani Anies. Kontrak itu salah satunya meminta Jokowi melindungi dan menata ekonomi informal, seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional. Kontrak itu ditandatangani 15 September 2012.

"Untuk becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya yang juga harus kami tunaikan. Jadi, kami buat dalam satu kontinuitas, satu kesinambungan," ujar Sandiaga.

4.2.1.5 Judul Berita: Kembalinya Sepeda Motor Melintas di Thamrin yang Menuai Pro Kontra...

Edisi/Tanggal: 15 Januari 2018 pukul 10:39 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.5 Hasil Analisis Berita 5

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Pro-kontra melintas kembali sepeda motor di jalan MH Thamrin
<i>Diagnose Causes</i>	Dicabutnya pergub larangan sepeda motor melintas di jalan MH Thamrin karena bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi
<i>Make Moral Judgement</i>	Menghadirkan prinsip kesetaraan kesetaraan, kesempatan, dan keadilan bagi masyarakat Jakarta
<i>Treatment Recommendation</i>	Evaluasi kebijakan setelah satu bulan diterapkan

Define Problems

Kompas.com membahas diperbolehkannya kembali sepeda motor melintas kembali di jalan MH Thamrin hingga jalan Medan Merdeka Barat. Kebijakan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung (MA) mencabut peraturan gubernur (pergub) soal pelarangan melintasnya sepeda motor di jalan MH Thamrin hingga jalan Medan Merdeka Barat.

Pelarangan melintasnya sepeda motor di jalan MH Thamrin hingga jalan Medan Merdeka Barat diteken ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih

menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada periode sebelumnya. Dengan pencabutan larangan tersebut melalui terbitnya surat putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017, Pemprov DKI harus membebaskan kembali sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Diagnose Cause

Mahkamah Agung (MA) selaku pihak yang mencabut peraturan gubernur (pergub) soal pelarangan sepeda motor di sepanjang jalan MH Thamrin hingga jalan Merdeka Barat mempunyai argument bahwa pergub tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemprov DKI Jakarta harus membebaskan kembali sepeda motor melintasi jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat setelah keluarnya surat putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017 lalu. Sehingga MA meyakini bahwa pergub tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

“MA menyebutkan, Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Make Moral Judgement

Kompas.com membuat justifikasi moral dengan menuliskan melalui pencabutan larangan pergub tersebut bukan cuma kabar baik, tapi juga menjalankan sesuatu berdasarkan prinsip keadilan. Keputusan MA ini sejalan dengan ide yang pernah digagas oleh Anies Baswedan untuk

menghadirkan kesetaraan, kesempatan, dan keadilan bagi masyarakat Jakarta

“Menurut Anies, keputusan MA ini sejalan dengan ide yang pernah digagasnya untuk menghadirkan kesetaraan, kesempatan, dan keadilan bagi masyarakat Jakarta.”

Treatment Recommendation

Pencabutan pergub larangan melintasnya sepeda motor di jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, rupanya mendapat sorotan dari pihak kepolisian. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra, menilai dengan ketiadaan sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat memberikan banyak hal positif.

Kendati kurang setuju, Halim mengaku akan mengikuti peraturan yang sudah diputuskan itu. Jika nantinya sepeda motor kembali diperbolehkan melintasi kawasan tersebut, pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan berharap adanya evaluasi dari kebijakan.

“Kepolisian berharap akan ada evaluasi kebijakan ini setelah satu bulan diterapkan.”

4.2.2 Analisis Framing Pemberitaan *Detik.com*

4.2.2.1 Judul Berita: Anies Dilaporkan soal Pidato Pribumi, Sandiaga: Nggak

Ada Komentar

Edisi/Tanggal: 18 Oktober 2017

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.6 Hasil Analisis Berita 6

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Polemik penggunaan kata 'pribumi'
<i>Diagnose Causes</i>	Penggunaan kata 'pribumi' dapat memecah belah keberagaman di Indonesia
<i>Make Moral Judgement</i>	Menilai penggunaan kata 'pribumi' sudah sesuai dengan ketentuan
<i>Treatment Recomendation</i>	Tidak memberikan penawaran solusi

Define Problems

Detik.com dalam framingnya menyebutkan bahwa wakil Gubernur terpilih, Sandiaga Uno enggan berkomentar terkait penggunaan kata 'pribumi' dalam pidato yang dilakukan oleh Anies Baswedan hingga dilaporkannya Anies Baswedan ke Bareskrim Polri pada 17 Oktober 2017 oleh ormas Gerakan Pancasila.

Pelaporan tersebut karena ormas Gerakan Pancasila menilai kata 'pribumi' yang digunakan oleh Anies Baswedan dalam pidato politik dapat memecah belah keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu, pelaporan Anies Baswedan juga terkait dengan pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnis.

Diagnose Cause

Detik.com menyebutkan bahwa gubernur Anies Baswedan dilaporkan ke Bareskrim Polri pada tanggal 17 Oktober 2017. Hal tersebut

terkait penggunaan kata 'pribumi' yang dianggap oleh Gerakan Pancasila dapat memecah belah keberagaman yang ada di Indonesia, karena melanggar UU No. 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

“Koordinator Gerakan Pancasila Jack Boyd Lopian mengatakan kata 'pribumi' yang disebut Anies dalam pidato di Balai Kota diduga bisa memecah belah keberagaman di Indonesia. Anies dilaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.”

Make Moral Judgement

Soal penggunaan kata 'pribumi' dalam pidato politiknya yang dilakukan oleh Anies Baswedan, Advocat Cinta Tanah Air (ACTA) melakukan pembelaan terhadap Anies. ACTA telah membaca soal pidato tersebut dan menurut mereka, apa yang dilakukan Anies dalam pidato politiknya sama sekali tidak ada maksud untuk memecah belah keberagaman yang ada di Indonesia seperti yang dituduhkan oleh Gerakan Pancasila.

"Ratusan advokat ACTA akan pasang badan membela Gubernur Anies Baswedan terkait istilah 'pribumi' yang disampaikan dalam pidato di Balai Kota, 16 Oktober 2017. Kami telah membaca berita soal pidato tersebut secara saksama dan menurut kami tidak ada yang salah dengan pidato tersebut," ujar Ketua ACTA Krist Ibnu T Wahyudi”

Treatment Recommendation

Dalam berita terkait polemik kata 'pribumi' dalam pidato politik Anies Baswedan setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta di hadapan para warga pada 16 Oktober 2017 lalu, *Detik.com* tidak

memberikan penawaran rekomendasi dalam beritanya yang dirilis pada 18 Oktober 2017 melalui laman resminya .

4.2.2.2 Judul Berita: Penataan Tanah Abang, Anies: Semuanya Sesuai Aturan

Edisi/Tanggal: 23 Desember 2017 pukul 18:55 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.7 Hasil Analisis Berita 7

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Penataan PKL kawasan Tanah Abang
<i>Diagnose Causes</i>	Penutupan jalan di Tanah Abang untuk mengakomodasi PKL dan tidak melanggar aturan
<i>Make Moral Judgement</i>	Menyatakan apa yang dilakukan Anies Baswedan merupakan upaya keberpihakan kepada masyarakat
<i>Treatment Recomendation</i>	Akan mereview kebijakan penataan tersebut.

Define Problems

Detik.com memframing bahwa konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang tidak melanggar aturan. Sebelum merilis konsep penataan Kawasan di Tanah Abang, Anies Baswedan menegaskan penutupan tersebut untuk mengakomodasi para PKL dan Anies mengaku sudah meninjau semua aturan sebelum penataan dilakukan.

Anies pun mengungkapkan penataan di Kawasan Tanah Abang adalah upayanya dalam keberpihakan kepada masyarakat mulai dari PKL, *commuter*, pejalan kaki, hingga transportasi umum. Anies juga akan memastikan kebijakan yang dilakukannya akan memberikan manfaat kepada semua pihak.

Diagnose Cause

Penataan kawasan Tanah Abang yang diusung Anies dengan memberikan pedagang kaki lima (PKL) untuk berdagang di jalan adalah upayanya untuk mengakomodasi kebutuhan para PKL. Anies pun menilai apa yang dilakukannya sebelum menjalankan konsep penataan tersebut sudah *me-review* semua aturan yang berlaku dan tidak ada yang dilanggar.

"Semuanya kita jalankan sesuai dengan aturan, semua kita jalankan, kita sudah *me-review* semua aturan," kata Anies di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2017).

Make Moral Judgement

Evaluasi moral yang ditampilkan *Detik.com* terkait penataan PKL kawasan Tanah Abang ialah memuat pernyataan dari Anies Baswedan bahwa, kebijakan penataan tersebut berpihak kepada mereka yang juga ingin mendapatkan kesempatan hidup, kesempatan untuk merasakan peredaran kegiatan ekonomi di wilayah Tanah Abang.

“Dan kita akan jelas berpihak kepada mereka yang juga ingin mendapatkan kesempatan hidup, kesempatan untuk merasakan peredaran kegiatan ekonomi di wilayah Tanah Abang,” ujarnya.”

Treatment Recommendation

Solusi yang ditawarkan oleh *Detik.com* ialah dengan menuliskan pernyataan Anies yang akan *me-review* kebijakan penataan PKL di Tanah

Abang dengan memastikan bahwa trotoar dalam keadaan tertib, tidak mengganggu pejalan kaki sehingga pejalan kaki di daerah tersebut bisa leluasa berjalan.

“Semuanya nanti akan kita review dan kita pastikan bahwa trotoarnya dalam keadaan tertib, bersih dari mereka yang menghambat jalannya pejalan kaki, sehingga pejalan kaki daerah itu bisa leluasa berjalan,” sambung Anies.”

4.2.2.3 Judul Berita: OK OCE Disebut Hanya Cuap-Cuap, Sandi: Pelatihan

Memang Seperti Itu

Edisi/Tanggal: 09 Januari 2018

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.8 Hasil Analisis Berita 8

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Pelatihan program OK OCE
<i>Diagnose Causes</i>	Dalam pelatihan program OK OCE dibutuhkan kata-kata untuk memulai langkah nyata
<i>Make Moral Judgement</i>	Menilai seharusnya pengusaha yang memberikan pelatihan, bukan dari Pemprov DKI Jakarta
<i>Treatment Recommendation</i>	Menyaring peserta lebih selektif dan tidak melatih pedagang musiman

Define Problems

Detik.com membuat framing berita terkait pelatihan program OK OCE yang dikritik anggota Komisi B DPRD DKI Nur Afni Sajim yang menyebut pelatihan OK OCE hanya cuap-cuap belaka. Menurut Sandi,

pelatihan kewirausahaan memang membutuhkan penjelasan melalui kata-kata.

Sandi juga meminta agar tidak meremehkan kata-kata dan setuju dengan pendapat Anies Baswedan bahwa kata-kata dibutuhkan dalam memulai langkah. Oleh karena itu, jangan sampai mendegradasi kata-kata dalam pelatihan program OKE OCE.

Diagnose Cause

Detik.com menjelaskan melalui pernyataan Wakil Gubernur Sandiaga Uno bahwa dalam pelatihan wirausaha, seperti OK OCE memerlukan penjelasan kata-kata. Selain itu Sandi meminta agar tidak meremehkan kata-kata untuk memulai langkah nyata.

“Sandi pun meminta agar tidak meremehkan kata-kata. Ia setuju dengan pendapat Anies soal dibutuhkannya kata-kata untuk memulai langkah nyata.”

Make Moral Judgement

Sandiaga Uno membenarkan seharusnya yang memberikan pelatihan kewirausahaan seperti program OKE OCE adalah oleh pengusaha, bukannya aparat Pemprov DKI Jakarta. Namun ia memaklumi apabila OKE OCE belum berjalan sesuai rencana seperti yang ia harapkan dan berharap kedepannya akan berjalan lebih baik lagi.

“Yang harus memberikan pendampingan dan pelatihan ini pengusaha. Karena ini masih awal-awal mungkin masih agak sedikit rancu, mudah-mudahan lebih baik ke depan,” jelasnya.”

Treatment Recommendation

Dalam berita mengenai program pelatihan OKE OCE, *Detik.com* melalui pernyataan Nur Afni Sajim membuat rekomendasi agar Dinas UMKM lebih selektif dalam selektif menyaring peserta dan tidak melatih pedagang musiman. Afni juga menilai, bahwa Dinas UMKM tak perlu membuat pelatihan karena pelatihan OKE OCE yang digagas oleh pemprov DKI Jakarta hanya ‘cuap-cuap’.

“Sebelumnya, anggota Komisi B Nur Afni Sajim meminta Dinas UMKM selektif menyaring pesertanya dan tidak melatih pedagang musiman. Ia mempersoalkan keterlibatan lurah dan camat dalam mencari pedagang peserta program OK OCE.”

4.2.2.4 Judul Berita: Soal Pengoperasian Becak, Sandi: Ada Kontrak Politik, Kita

Tunaikan

Edisi/Tanggal: 17 Januari 2018 pukul 10:57 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.9 Hasil Analisis Berita 9

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Kontak politik kebijakan becak
<i>Diagnose Causes</i>	Akan menunaikan yang menjadi kontrak politik
<i>Make Moral Judgement</i>	Kerap diingatkan oleh warga kepastian mewujudkan janji dalam kontrak politik
<i>Treatment Recomendation</i>	Berjanji melunasi kontrak politik

Define Problems

Detik.com membuat framing bahwa kebijakan terkait pengoperasian becak di DKI Jakarta merupakan kontrak politik dan akan menunaikan semua yang menjadi kontrak politik. Wakil gubernur Sandiaga Uno mengatakan bahwa akan menunaikan semua yang sudah menjadi kontrak politik dan tidak memilah-milah kontrak politik.

Menurutnya kontrak politik terkait dengan kebijakan pengoperasian becak di DKI Jakarta merupakan kontrak politik dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga akan dibuat suatu kesinambungan. Anies Baswedan selaku Gubernur pun sering diingatkan oleh warganya agar tak lupa dengan kontrak politiknya dan menunaikan apa yang sudah dibuat dalam kontrak politik tersebut.

Diagnose Cause

Pemberitaan mengenai pengoperasian becak di DKI Jakarta menyeruak ketika Anies-Sandi menandatangani kontrak politik yang terkait dengan becak ketika keduanya masih berstatus calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kini setelah dilantik dan resmi menjadi gubernur dan wakil gubernur, dituntut untuk menunaikan apa yang sudah menjadi janji politiknya.

Wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjawab dengan diplomatis saat dimintai konfirmasi dengan janji politik tentang becak. Sandi mengatakan akan menunaikan kontrak politik tersebut tanpa memilah-milah.

"Dan untuk becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya juga yang harus kita tunaikan. Jadi buat kita, buat dalam satu kontinuitas satu kesinambungan," terang dia.

Make Moral Judgement

Detik.com membuat justifikasi moral dengan menuliskan bahwa Anies Baswedan melontarkan wacana pengoperasian becak saat meluncurkan program Community Action Plan (CAP) dan tak lama setelahnya muncul lembar kontrak politik Anies-Sandi dengan komunitas Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu.

“Dalam lembaran tersebut, ada 3 poin kontrak, termasuk soal janji perlindungan dan pengelolaan becak. Dari foto yang beredar, lembar kontrak politik itu diteken Anies pada 2 Oktober 2016.”

Untuk pengoperasian becak pun Anies kerap diingatkan oleh warga yang diingatkan oleh warga dan warga kerap menyodorkan kontrak politik tersebut

"Saya tuh sering sekali kalau datang ke kampung-kampung, pada nanya, 'Pak Anies, Bapak blenjani (ingkar) nggak nanti'? Sering itu. Saya itu, ketika disodorkan kontrak politik, saya bilang, 'Ini kan kontak politik yang dulu,'" kata Anies saat dimintai konfirmasi soal wacana pengoperasian becak di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Treatment Recommendation

Anies Baswedan kerap kali diingatkan oleh warga terkait dengan janji politik soal pengoperasian becak. Warga bertanya soal kepastian janji kontrak politik yang kerap menyodorkan kontrak politik yang dilakukan oleh sebelumnya. Oleh sebab itu, Anies berjanji akan melunasi kontak politiknya soal pengoperasian becak di DKI Jakarta sama seperti halnya ia

menyelesaikan kontrak politik soal reklamasi pantai utara Jakarta yang menurutnya sudah ia lunasi.

“Anies berjanji kepada warga akan melunasi kontrak politiknya. Dia bahkan menyinggung kontrak politik mengenai proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang menurutnya sudah dilunasi”

4.2.2.5 Judul Berita: Ungkapan Senang Para Rider Ketika Boleh Melintas Lagi di

Jl Thamrin

Edisi/Tanggal: 10 Januari 2018 pukul 16:16 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.10 Hasil Analisis Berita 10

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Dicabutnya larangan melintas sepeda motor di jalan MH Thamrin
<i>Diagnose Causes</i>	Ungkapan gembira pencabutan larangan melintas sepeda motor di jalan MH Thamrin
<i>Make Moral Judgement</i>	Dinilai dengan pencabutan tersebut dapat mempercepat waktu tempuh
<i>Treatment Recomendation</i>	Lebih baik tidak dicabut agar tidak terjadi kesemrawutan di Kawasan jalan MH Thamrin menurut para pengguna jalan yang kontra dengan kebijakan pelarangan tersebut.

Define Problems

Detik.com membahas tentang dicabutnya larangan melintas sepeda motor di jalan MH Thamrin banyak pengendara sepeda motor yang merasa terbantu dengan kebijakan tersebut. Pencabutan tersebut menimbulkan

pro-kontra bagi sesama pengguna jalan yang sering melintas di jalan MH Thamrin hingga jalan Medan Merdeka Barat.

Bagi mereka yang pro dengan pencabutan tersebut, mereka menilai dapat menghemat waktu tempuh dan dapat mengurangi stress akibat kemacetan yang terjadi di jalan alternatif. Sebaliknya, bagi mereka yang kontra, mereka menilai dengan dicabutnya pelarangan sepeda motor melintas di jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat akan kembali menimbulkan kesemrawutan di Kawasan tersebut dan

Diagnose Cause

Detik.com menjelaskan dengan pencabutan peraturan tersebut pengendara motor merasa senang dan dapat terbantu dengan dicabutnya pelarangan sepeda motor di jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.

"Wah enak, bener-bener terbantu banget, bisa lebih cepet sampai tempat tujuan tanpa harus muter-muter," ujar pengendara motor Didi (30) di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018)."

Make Moral Judgement

Detik.com membuat keputusan moral dengan adanya pencabutan tersebut dapat mengurangi waktu tempuh dan mengurangi stress yang kerap terjadi di jalan alternatif.

"Rasanya seneng, nggak perlu lewat perempatan belakang Sarinah yang macet, waktu tempuh jadi lebih cepet dan mengurangi stres karena kena macet," ujar Akbar"

Treatment Recommendation

Detik.com menuliskan rekomendasi solusi dalam beritanya yang terkait dengan pencabutan larangan melintasnya sepeda motor di jalan MH Thamrin dapat menyebabkan kembali kesemrawutan di kawasan MH

Thamrin-Medan Merdeka Barat menurut para pengendara yang kontra terhadap pencabutan tersebut.

"Kalau menurut saya sih mendingan tak usah dikasih motor, khusus mobilaja. Takutnya kayak dulu suka banyak kejadian kecelakaan motor, apalagi jalan di sana (Bundaran HI) tahu sendiri tak ada pelannya itu mobil. Tapi tak tahu juga sekarang kalau baru dibuka," ujar Gaung.

Pernyataan tersebut juga didukung dengan pernyataan dari pengguna jalan yang kerap melintas di kawasan MH Thamrin.

"Kalau dibuka lagi semrawut lagi Jalan Thamrin, nanti semrawut lagi banyak yang mangkal nanti di trotoar," ujar Jay. Sebelumnya, MA membatalkan Pergub DKI Jakarta No 195/2014 tentang Perubahan atas Pergub DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dalam pergub itu, pada pukul 06.00-23.00 WIB, motor dilarang melintas di HI-Monas.

4.2.3 Analisis Framing Pemberitaan *Republika.co.id*

4.2.3.1 Judul Berita: ACTA Siap Bela Anies Soal Pidato ‘pribumi’

Edisi/Tanggal: 18 Oktober 2017 pukul 07:43 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.11 Hasil Analisis Berita 11

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	ACTA siap membantu Anies terkait pidatonya yang dilaporkan ke polisi
<i>Diagnose Causes</i>	Secara konteks istilah pribumi sangat tepat
<i>Make Moral Judgement</i>	Penggunaan kata “pribum” tidak menyalahi aturan dan dianggap sesuai

	ketentuan
<i>Treatment Recommendation</i>	Anies tak perlu risau dan fokus saja melayani rakyat Jakarta

Define Problems

Republika.co.id dalam framingnya menyebutkan bahwa ratusan Advokat yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) siap membantu Anies Baswedan yang dilaporkan ke polisi terkait polemik penggunaan kata ‘pribumi’ dalam pidatonya dan ACTA pun siap pasang badan untuk membela Anies Baswedan. ACTA menyatakan, mereka telah membaca perihal video pidato politik Anies Baswedan tersebut dan menilai bahwa tidak yang salah dengan penggunaan kata ‘pribumi’.

Penggunaan kata ‘pribumi’ yang digunakan Anies dalam pidato politiknya mempunyai maksud bahwa pribumi dahulu pernah ditindas dan sudah saatnya kini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Atas dasar itulah maka ACTA menyatakan agar Anies konsentrasi dalam melakukan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta, karena tidak ada celah hukum untuk menjerat Anies Baswedan.

Diagnose Cause

Dalam polemik penggunaan kata ‘pribumi’ Anies mengatakan bahwa ‘pribumi’ yang dimaksud adalah soal perjuangan perlawanan terhadap kolonialisme pada saat sebelum kemerdekaan. Wahyudi selaku ketua umum Advokat Cinta Tanah Air menyebut mereka yang menuduh Anies rasis mesti belajar sejarah.

“Secara kontekstual Anies menyampaikan istilah pribumi secara sangat tepat. Yaitu, saat berbicara soal perjuangan pribumi melawan kolonialisme pada masa sebelum kemerdekaan. Saat itu topiknya mengenai bagaimana pribumi dulu ditindas oleh penjajah.”

Make Moral Judgement

Keputusan moral yang dibuat *Republika.co.id* adalah dengan menuliskan bahwa penggunaan kata ‘pribumi’ tidak menyalahi aturan dan dianggap sesuai ketentuan.

"Sejak kecil di bangku sekolah, kata Wahyudi, pendidikan memang mengajarkan bahwa dahulu pribumi pernah dijajah oleh kolonialis. Maka, secara redaksional Wahyudi melanjutkan, istilah yang disampaikan Anies tidak masalah. Secara persis Anies menyebutkan, "Dulu kita semua pribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri,"

Treatment Recommendation

Republika.co.id menawarkan solusi terkait polemik penggunaan kata ‘pribumi’ dalam pemberitaannya dengan menyatakan bahwa gubernur Anies Baswedan tidak perlu takut terhadap pelaporan dirinya ke kepolisian terkait polemik tersebut. Penggunaan kata kita semua pribumi jelas membuktikan bahwa yang dimaksud Anies adalah semua elemen bangsa Indonesia yang berhadap-hadapan dengan kolonialis asing. Karena itu, ACTA meminta Gubernur Anies tidak perlu risau dengan laporan ke polisi terkait pidato tersebut.

"Mas Anies konsentrasi saja kerja melayani rakyat Jakarta. Kami yakin urusan ini tidak akan kemana-mana dan tidak ada celah untuk menjerat Mas Anies secara hukum," tegasnya.”

4.2.3.2 Judul Berita: Penataan Tanah Abang Berdayakan PKL, Muliakan Pejalan

Edisi/Tanggal: 23 Desember 2017 pukul 06:11 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.12 Hasil Analisis Berita 12

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	<i>Republika.co.id</i> memuat bahwa penataan tahap 1 PKL Tanah Abang tidak hanya memberdayakan pedagang, tapi juga memuliakan pejalan kaki
<i>Diagnose Causes</i>	Penataan kawasan Tanah Abang merupakan masih tahap awal
<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Republika.co.id</i> memuat keputusan moral bahwa penataan tersebut juga bertujuan untuk menata pihak-pihak yang memanfaatkan PKL, seperti adanya pungutan liar
<i>Treatment Recommendation</i>	<i>Republika.co.id</i> menyatakan penyelesaian masalah terkait penataan PKL kawasan Tanah Abang adalah dengan terus mengevaluasi dan mengontrol penataan kawasan tersebut.

Define Problems

Republika.co.id membuat framing bahwa penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang tidak hanya memberdayakan pedagang, tapi juga memuliakan pejalan kaki. Artinya, penataan tersebut masih tahap awal dan nantinya akan ada pemindahan kegiatan kereta api di Kawasan Tanah Abang.

Pada penataan tahap yang bersifat sementara itu bertujuan untuk memfasilitasi para pedagang yang tidak mampu dalam ekonomi. Selain itu, kebijakan tersebut juga untuk menata pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan mencari keuntungan di Kawasan Tanah Abang, seperti pungutan liar (pungli).

Diagnose Cause

Republika.co.id memuat bahwa penataan yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta terkait PKL di kawasan Tanah Abang merupakan masih tahap awal dan bersifat sementara untuk mengantisipasi berapa jumlah PKL yang ada disana. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta dalam menata PKL di ialah dengan akan ada pemindahan kegiatan stasiun kereta api di kawasan tersebut.

"(Penataan)Ini tahapan awalnya itu sifatnya sementara. Itu kan cumaantisipasi berapa jumlah pedagang PKL yang ada di sana. Kemudian sebetulnya kan mereka tidak mampu secara ekonomi, jadi salah satu cara yang dilakukan adalah memfasilitasi tapi sekaligus dalam proses menata kawasan tanah abang," kata Yayat saat dihubungi *Republika.co.id*, Jumat (22/12) malam."

Make Moral Judgement

Evaluasi moral yang ditampilkan *Republika.co.id* terkait penataan PKL kawasan Tanah Abang juga bertujuan untuk menata berbagai pihak yang memanfaatkan kehadiran PKL, seperti pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tidak hanya para pungli yang mesti ditindak tetapi juga yang parkir di area trotoar serta yang membuat trotoar menjadi kotor.

"Jadi yang ditertibkan bukan hanya PKLnya saja, tali juga menata orang-orang yang memanfaatkan kehadiran PKL. Supaya tidak ada pihak yang memanfaatkan Tanah Abang itu untuk kepentingan-kepentingan mencari keuntungan," tambahnya. "Yang parkir di trotoar itu harus ditindak, yang ngotorin trotoar itu harus ditindak (juga)," kata Yayat."

Treatment Recommendation

Pemprov DKI Jakarta harus terus mengevaluasi dan mengontrol penataan kawasan tersebut dan memperbaiki segala kekurangan dari program tersebut. Dalam dua minggu akan dilihat perubahannya entah itu perubahan yang baik ataupun buruk sehingga kekurangan yang terjadi dapat diperbaiki.

"Kita lihat dalam seminggu dua minggu ini lah, kalau ada perubahan ataupun kekurangan nanti bisa diperbaiki. Apakah kondisi ini lebih baik atau tidak. Kalau ada kekurangan itu nanti diperbaiki," katanya.

4.2.3.3 Judul Berita: Program Pelatihan OK OCE Dikritik, Ini Jawaban Santai

Sandi

Edisi/Tanggal: 09 Januari 2018 pukul 21:46 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.13 Hasil Analisis Berita 13

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Pelatihan program OK OCE dinilai kurang praktis
<i>Diagnose Causes</i>	Menganggap mustahil dalam pelatihan tanpa kata-kata
<i>Make Moral Judgement</i>	Memberikan contoh dan motivasi bagi para calon pengusaha dan pengusaha

	baru
<i>Treatment Recommendation</i>	Berharap program OK OCE dapat digarap lebih baik

Define Problems

Republika.co.id memframing bahwa program One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK OCE) yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai kurang praktis hanya berisi kata-kata tanpa tindak lanjut yang jelas. Sandiaga Uno menjelaskan bahwa tidak mungkin dalam sebuah pelatihan namun tidak ada kata-kata.

Sandiaga menjelaskan pelatihan OKE OCE bertujuan untuk memberikan contoh dan motivasi bagi para calon pengusaha dan pengusaha baru. Penyampaian secara lisan dalam pelatihan OKE OCE harusnya dapat dihargai, karena itu menjadi narasi dan gagasan sebelum kerja yang sesungguhnya dimulai.

Diagnose Cause

Sandiaga Uno menilai dalam setiap pelatihan menganggap wajar apabila hanya berisi kata-kata, bahkan menurutnya tidak mungkin dalam suatu pelatihan tanpa adanya kata-kata. Dia juga mencotohkan bagaimana bagaimana ibunya, Mien R Uno, dihadapan para wartawan sambil memainkan mimik wajahnya.

"Sandiaga mengatakan hal itu wajar terjadi dalam sebuah pelatihan. Ia bahkan menganggap mustahil suatu pelatihan dapat diberikan tanpa kata-kata. "Kalau program cuap-cuap, ya pelatihan itu memang seperti itu ya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/1)."

Make Moral Judgement

Republika.co.id membuat justifikasi moral dengan menuliskan bahwa pelatihan OK OCE bertujuan untuk memberikan contoh dan motivasi bagi para calon pengusaha dan pengusaha baru sehingga kata-kata menjadi bagian penting didalamnya. Sandi juga meningkatkan pesan Anies Baswedan untuk tidak meremehkan kata-kata, sebab kata-kata menjadi narasi dan gagasan sebelum kerja sesungguhnya dimulai.

“Sandiaga menjelaskan, pelatihan OK OCE bertujuan untuk memberikan contoh dan motivasi bagi para calon pengusaha dan pengusaha baru. Oleh karena itu, kata-kata menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut”

Treatment Recommendation

Republika.co.id memberikan rekomendasi solusi dengan menuliskan pelatihan OK OCE tidak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), namun pengusaha. Program OK OCE diharapkan tidak hanya memberikan teori, namun juga menyediakan pendampingan. Meskipun saat ini pelatihan OKE OCE masih dinilai rancu karena pelatihan oleh ASN, kedepannya Sandi berharap agar pelatihan OKE OCE digarap lebih baik lagi.

“Idealnya, pelatihan OK-OCE tidak dilakukan oleh aparat sipil negara (ASN), namun pengusaha. Mereka tidak hanya memberikan teori, namun juga akan menyediakan pendampingan”

4.2.3.4 Judul Berita: Fakta: Becak Transportasi Ramah Lingkungan

Edisi/Tanggal: 16 Januari 2018 pukul 23:18 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.14 Hasil Analisis Berita 14

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Becak moda transportasi yang ramah lingkungan
<i>Diagnose Causes</i>	Becak bisa menjadi alat transportasi jarak pendek dan transportasi di lokasi pariwisata Jakarta
<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Republika.co.id</i> membuat keputusan moral bahwa sempat diperbolehkan di Jakarta sebagai salah satu alternative pekerjaan pada masa krisis ekonomi.
<i>Treatment Recomendation</i>	<i>Republika.co.id</i> menawarkan solusi agar becak diberi ruang kembali di Jakarta asal ada aturan dan pengawan yang konsisten.

Define Problems

Republika.co.id mebuat framing bahwa becak merupakan moda transportasi yang manusiawi dan ramah lingkungan. Melalui ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) menilai becak cocok untuk transportasi di wilayah pemukiman warga.

Becak dianggap bisa menjadi alat transportasi jarak pendek di pemukiman dan moda transportasi di Kawasan wisata DKI Jakarta. Meskipun demikian becak tetap harus dibuat aturan dan pengawasan agar

keberadaannya memberikan pelayanan yang aman, nyaman, tidak terjadi kesemrawutan, dan terkendali.

Diagnose Cause

Becak dinilai menjadi moda transportasi manusiawi dan ramah lingkungan dan dianggap cocok berada di wilayah pemukiman warga. Selain berada di pemukiman warga, becak bisa menjadi transportasi yang fungsinya menjadi transportasi di kawasan lokasi wisata yang ada di DKI Jakarta. Agar tidak terjadi kesemrawutan maka pemprov DKI Jakarta perlu membuat aturan serta mengawasi keberadaan becak-becak tersebut.

"Menurut Tigor, becak bisa menjadi alat transportasi jarak pendek di permukiman dan transportasi wisata di lokasi pariwisata Jakarta. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat aturan dan mengawasi agar keberadaan becak di Jakarta bisa memberikan layanan yang aman, nyaman, tidak semrawut dan terkendali."

Make Moral Judgement

Republika.co.id membuat justifikasi moral dengan menuliskan becak sempat diperbolehkan di masa Gubernur Sutiyoso sebagai salah satu alternatif pekerjaan kaum miskin pada masa krisis ekonomi, namun keberadaannya kembali dilarang oleh Sutiyoso juga.

"Becak sempat diperbolehkan kembali di Jakarta oleh Gubernur Sutiyoso pada 1998 dengan alasan memberi salah satu alternatif pekerjaan kaum miskin pada masa krisis ekonomi. Namun, sekitar 2001, becak kembali dilarang di Jakarta oleh Sutiyoso juga. Saat itu, keberadaan becak di Jakarta memang sudah hampir habis."

Treatment Recommendation

Terkait dengan beroperasi becak di kawasan DKI Jakarta maka hal tersebut sah-sah saja dilakukan, asal untuk aturan mengenai pengoperasian

becak tersebut harus ada secara jelas serta pengawasannya bersifat konsisten. Sehingga para pemilik becak dapat menawarkan jasanya lebih leluasa dan tak perlu sembunyi-sembunyi lagi.

“Boleh juga becak diberi ruang kembali di Jakarta, asal ada aturan dan pengawasan yang konsisten,” kata Tigor melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (16/1).”

4.2.3.5 Judul Berita: MA: Larangan Sepeda Motor Melintas Langgar HAM

Edisi/Tanggal: 12 Januari 2018 pukul 18:42 WIB

Framing: Robert N. Entman

Tabel 4.15 Hasil Analisis Berita 15

Perangkat Framing Robert N. Entman	Keterangan
<i>Define Problems</i>	Pelarangan sepeda motor melanggar prinsip hak asasi
<i>Diagnose Causes</i>	<i>Republika.co.id</i> melalui Mahkamah Agung (MA) menyatakan pelarangan melintasnya sepeda motor telah melanggar hak wajib pajak.
<i>Make Moral Judgement</i>	<i>Republika.co.id</i> membuat keputusan moral bahwa pergub DKI Jakarta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum
<i>Treatment Recommendation</i>	<i>Republika.co.id</i> memberi rekomendasi melalui pernyataan MA mencabut pelarangan melintasnya sepeda motor di jalan MH Thamrin-Merdeka Barat karena melanggar perundang-undangan yang lebih tinggi

Define Problems

Republika.co.id membuat framing bahwa terkait pergub yang sebelumnya berlaku terkait pelarangan melintasnya roda dua di jalan MH Thamrin hingga jalan Merdeka Barat telah melanggar prinsip hak asasi. Mahkamah Agung (MA), melalui Abdullah berpendapat bahwa pajak yang dibayarkan sama tapi mengapa ada pelarangan sepeda motor di jalan MH Thamrin hingga jalan Medan Merdeka Barat, ini adalah prinsip awal mengapa pelarangan tersebut dianggap sebagai pelarang hak asasi.

Selain melanggar hak asasi, pelarangan sepeda motor melintas di jalan MH Thamrin hingga jalan Medan Merdeka Barat melanggar dua undang-undang yang lebih tinggi, pasal 133 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. MA memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada pengendara motor melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat tanpa adanya tenggat waktu.

Diagnose Cause

Peraturan Gubernur (pergub) mengenai pelarangan melintasnya sepeda motor di jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat menurut Kepala Biro Humas Mahkamah Agung, Abdullah, telah melanggar hak wajib pajak. Apabila Pemprov DKI Jakarta belum bisa memberikan akses bisa bagi pengendara sepeda motor menikmati Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, maka peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan

yang sudah ada, yaitu pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

"Abdullah mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tersebut telah melanggar hak wajib pajak. Bila Pemerintah Daerah DKI Jakarta belum bisa memberikan akses bagi pengendara sepeda motor menikmati Jalan MH Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia sampai Medan Merdeka Barat, maka peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, yaitu pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan"

Make Moral Judgement

Mahkamah Agung (MA) menjelaskan dengan dicabutnya pelarangan tersebut maka Pergub DKI tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Untuk proses pemberian akses bagi pengendara sepeda motor dapat melintas di jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, MA memberikan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Dengan diumumkan putusan MA di dalam berita negara maka Pergub DKI Jakarta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Lebih lanjut Abdullah mengatakan bahwa MA menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengenai pemberian akses bagi pengendara sepeda motor untuk melintas di Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat."

Treatment Recommendation

Republika.co.id menawarkan solusi terkait pelarangan sepeda motor tersebut dengan mencabut pergub yang sudah ada karena dinilai telah bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-undang yang dimaksud adalah pasal 133 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“MA melalui Hakim Irfan Fachrudin mencabut Peraturan Gubernur terkait larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan menyatakan kebijakan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 133 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Selain itu pelarangan motor masuk Jalan Thamrin juga dinilai Fachrudin tidak sesuai pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.”

4.3 Pembahasan

4.3.1 Frame Kompas.com, Detik.com dan Republika.co.id: Penggunaan kata ‘pribumi’

Pemberitaan mengenai penggunaan kata ‘pribumi’ dalam pidato kemenangan Anies Baswedan turut masuk kedalam berita ketiga media tersebut, namun masing-masing media rupanya mempunyai cara pandang tersendiri dalam mengemas topik tersebut. *Kompas.com* menyatakan bahwa penggunaan kata ‘pribumi’ dapat menimbulkan polemik di masyarakat, *Detik.com* mengemas berita tersebut menyatakan bahwa penggunaan kata ‘pribumi’ sudah sesuai dengan ketentuan, hal senada dengan pula diberitakan oleh *Republika.co.id* menyebutkan kata ‘pribumi’ dalam pidato Anies Baswedan tidak ada yang salah dan tepat secara kontekstual.

Kompas.com memberikan penilaian moral mengenai polemik kata ‘pribumi’ ialah dengan pernyataan melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono bahwa lebih baik diganti dengan Warga Negara Indonesia, karena kata ‘pribumi’ dan “keturunan” melanggar UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta melanggar Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998

tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan. *Detik.com* justru memiliki perbedaan pandangan, *Detik.com* menyebutkan bahwa penggunaan kata ‘pribumi’ tidak ada ada yang salah. *Republika.co.id* memberikan penilaian moral dengan menyatakan bahwa penggunaan kata ‘pribumi’ yang disampaikan oleh Anies Baswedan dianggap tepat secara kontekstual.

Dalam pemberian solusi terkait polemik tersebut, *Kompas.com* memberikan solusi bahwa penggunaan kata ‘pribumi’ memang salah dan dilaporkan ke Bareskrim oleh organisasi sayap PDI-P, *Detik.com* sendiri tidak memberikan penawaran solusi terkait polemik tersebut, dan *Republika.co.id* justru punya pandangan lain. *Republika.co.id* menyatakan bahwa Anies Baswedan tidak perlu risau dengan lapora tersebut dan fokus untuk melayani rakyat Jakarta.

Dalam polemik penggunaan kata ‘pribumi’. *Kompas.com* membuat framing bahwa Anies Baswedan dianggap bersalah. *Detik.com* membuat framing terkait polemik dengan menuliskan bahwa dengan penggunaan kata ‘pribumi’, Anies dapat memecah belah keberagaman yg ada di Indonesia. *Republika.co.id* memframingkan bahwa penggunaan kata ‘pribumi’ dinilai sudah tepat.

4.3.2 **Frame *Kompas.com*, *Detik.com* dan *Republika.co.id*: Penataan PKL kawasan Tanah Abang**

Kompas.com memberitakan bahwa penataan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap PKL di kawasan Tanah Abang telah banyak melanggar ketentuan, hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Ombudsman RI Adrianus Meliala. *Detik.com* memberitakan bahwa Anies Baswedan telah *me-review* aturannya dan menyatakan bahwa penataan tersebut upaya keberpihakan kepada masyarakat baik itu PKL, *commuter*, pejalan kaki, hingga transportasi umum. Melalui pernyataan pengamat perkotaan Yayat Supriatna, *Republika.co.id* memuat bahwa penataan yang dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta tidak hanya untuk memberdayakan pedagang kaki lima (PKL) saja namun juga memuliakan pejalan kaki.

Kompas.com membuat penilaian moral dengan menyatakan bahwa konsep penataan PKL di kawasan Tanah Abang ada yang tidak diuntungkan dan terdapat indikasi adanya keberpihakan sehingga dapat menimbulkan malaadministrasi. *Detik.com* memiliki pandangan lain terhadap penilaian moral dalam beritanya terkait penataan di Tanah Abang, *Detik.com* menyatakan bahwa penataan di Tanah Abang akan berpihak kepada masyarakat. *Republika.co.id* memiliki pandangan dalam beritanya penataan tersebut supaya tidak ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan PKL seperti pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Solusi yang diberikan ketiga media tersebut, *Kompas.com*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id* memiliki kesamaan, yakni meminta

masyarakat tidak terburu menilai hasil dari penataan PKL tersebut dan pemprov DKI Jakarta harus terus *me-review* dan mengevaluasi kebijakan tersebut.

Framing ketiga media online dalam menanggapi penataan PKL di Tanah Abang memiliki perbedaan. *Kompas.com* menilai penataan tersebut melanggar aturan. *Detik.com* menilai kebijakan Anies tersebut tidak melanggar karena Anies telah *me-review* aturan. *Republika.co.id* membuat framing penataan tersebut untuk memuliakan pejalan kaki dan para pedagang.

4.3.3 Frame Kompas.com, Detik.com dan Republika.co.id: Pelatihan Program OK OCE

Kompas.com memberitakan bahwa program OK OCE yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta hanya dilakukan secara lisan tanpa praktik, pernyataan tersebut terlontar melalui kritik yang diberikan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim. *Detik.com* memberitakan bahwa pelatihan kewirausahaan seperti OK OCE memang memerlukan penjelasan dengan kata-kata dan Sandi pun meminta agar tidak meremehkan kata-kata untuk memulai langkah nyata. *Republika.co.id* memuat dalam sebuah pelatihan hal tersebut dianggap wajar, bahkan mustahil suatu pelatihan diberikan tanpa kata-kata.

Kompas.com membuat penilaian moral dengan menyatakan bahwa program OK OCE dinilai tidak siap, peserta direkrut secara asal-asalan oleh kelurahan, akibatnya banyak peserta yang tidak mengerti pelatihan

yang mereka ikuti.. *Detik.com* memiliki pandangan lain terhadap penilaian moral dalam beritanya terkait Program OK OCE, *Detik.com* menyatakan bahwa pelatihan wirausaha seperti OK OCE dilakukan oleh pengusaha bukannya oleh Pemprov DKI Jakarta. *Republika.co.id* memberikan penilaian terhadap program OK OCE dengan menyatakan pelatihan OK OCE bertujuan untuk memberikan contoh dan motivasi bagi para calon pengusaha dan pengusaha baru.

Terkait pemberitaan mengenai pelatihan OK OCE, *Kompas.com* memberikan rekomendasi solusi berupa pernyataan supaya memberikan lokasi sementara (loksem) ataupun lokasi binaan (lokbin) kepada peserta OK OCE untuk berwirausaha. *Detik.com* memberikan rekomendasi solusi yakni dengan menyaring peserta dan tidak memberikan pelatihan untuk pedagang musiman. *Republika.co.id* memberikan rekomendasi solusi dengan menuliskan pelatihan OK OCE tidak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), namun pengusaha. Program OK OCE diharapkan tidak hanya memberikan teori, namun juga menyediakan pendampingan.

Framing ketiga media online dalam memberitakan pelatihan program OK OCE memiliki perbedaan. *Kompas.com* menilai program pelatihan tersebut tidak siap. *Detik.com* menilai dalam setiap pelatihan membutuhkan kata-kata sebelum memulai langkah nyata. *Republika.co.id* membuat framing kata-kata dalam pelatihan OK OCE adalah untuk memberikan motivasi kepada peserta.

4.3.4 **Frame Kompas.com, Detik.com dan Republika.co.id: Pengoperasian Becak**

Kompas.com memberitakan bahwa nasib becak dibawah kepemimpinan Anies Baswedan-Sandiaga Uno akan lebih leluasa beroperasi, hal itu dapat terjadi karena Anies-Sandi memiliki kontrak politik. Terkait pengoperasian kembali becak, *Detik.com* memberitakan hal yang serupa dengan *Kompas.com*, yakni pengoperasian becak di Jakarta merupakan bagian dari kontrak politik yang harus ditunaikan keduanya. Disisi lain, *Republika.co.id* memberitakan becak ini didasarkan kepada becak merupakan moda transportasi yang manusiawi dan ramah lingkungan, selain itu becak cocok sebagai sarana transportasi di kawasan pariwisata Jakarta.

Penilaian moral yang diberitakan oleh *Kompas.com* bahwa kontrak politik tersebut dilakukan ditandatangani saat Anies masih berstatus sebagai calon gubernur. Kontrak politik tersebut juga merupakan bagian dari janji Anies dalam melindungi dan menata sektor informal seperti becak, PKL, dan nelayan. *Detik.com* memberikan justifikasi moral yang serupa dengan *Kompas.com*, yakni dalam kontrak politik tersebut, pengoperasian becak di Jakarta termasuk dalam janji perlindungan dan pengelolaan becak. *Republika.co.id* menyebut bahwa becak sempat diperbolehkan oleh gubernur Sutiyoso sebagai salah satu alternatif pekerjaan pada masa krisis ekonomi namun kembali dilarang kembali oleh Sutiyoso.

Baik *Kompas.com* dan *Detik.com*, keduanya tidak memberikan rekomendasi dalam beritanya terkait diperbolehkannya kembali becak oleh pemprov DKI Jakarta. Namun, dalam hal ini *Republika.co.id* memandang bahwa becak boleh diberi ruang untuk beroperasi di Jakarta tapi harus ada aturan dan pengawasan yang konsisten.

Framing ketiga media online dalam memberitakan pengoperasian becak memiliki perbedaan. *Kompas.com* menilai becak merupakan bagian dari kontrak politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno. *Detik.com* menilai becak ada dalam kontrak politik dan akan ditunaikan oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno. *Republika.co.id* membuat framing becak kendaraan yang ramah lingkungan dan dapat digunakan di kawasan pariwisata Jakarta.

4.3.5 Frame *Kompas.com*, *Detik.com* dan *Republika.co.id*: Pencabutan Larangan Melintas Sepeda Motor

Kompas.com memberitakan dicabutnya peraturan pelarangan melintasnya kembali sepeda motor di jalan MH Thamrin hingga jalan Merdeka Barat bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. MA menyebutkan, Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga MA meyakini bahwa pergub tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. *Detik.com* menyebutkan bahwa dengan dicabutnya peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah pengguna jalan yang terbiasa melintas di jalan tersebut. Senada dengan *Kompas.com*, *Republika.co.id* pun menganggap bahwa pergub tersebut melanggar hak wajib pajak dan bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

Kompas.com membuat penilaian moral dengan dicabutnya pergub larangan melintasnya sepeda motor di jalan MH Thamrin hingga jalan Merdeka Barat juga untuk menjalankan prinsip kesetaraan, kesempatan, dan keadilan bagi masyarakat Jakarta. *Detik.com* menilai dengan dicabutnya pergub tersebut dapat mempercepat waktu tempuh dan mengurangi stress yang diakibatkan kemacetan yang kerap terjadi di jalan alternatif. *Republika.co.id* menilai bahwa pergub pelarangan sepeda motor di jalan MH Thamrin hingga jalan Merdeka Barat tidak memiliki kekuatan hukum.

Kompas.com menawarkan solusi apabila pergub tersebut dicabut maka harus ada evaluasi kebijakan ini setelah satu bulan diterapkan. Dalam pemberitaan ini, *Detik.com* menuliskan rekomendasi agar larangan sepeda motor ini tidak dicabut melalui pernyataan para pengguna jalan yang kontra dengan kebijakan larangan tersebut karena dapat meningkatkan kecelakaan pengguna sepeda motor selain itu dapat menghadirkan kembali kesemrawutan di jalan MH Thamrin.

Republika.co.id menawarkan solusi bahwa pelarangan sepeda motor ialah dengan mencabut pergub tersebut karena bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Framing ketiga media online dalam memberitakan pencabutan pelarangan melintasnya kembali sepeda motor di kawasan jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat memiliki perbedaan. *Kompas.com* menilai pergub pelarangan sepeda melintas sepeda motor melanggar perundang-undangan yang lebih tinggi. *Detik.com* menilai pencabutan pelarangan tersebut menimbulkan pro dan kontra bagi pengguna jalan yang biasa melewati jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat. *Republika.co.id* membuat framing pelarangan melintasnya sepeda motor melanggar hak wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang sudah dilakukan oleh peneliti, untuk mengetahui bagaimana media online *Kompas.com*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id* mengkonstruksi berita pasca pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan menggunakan analisis framing Robert N. Entman, maka dapat diambil kesimpulan dari pemberitaan lima berita di ketiga media online tersebut, antara lain:

1. Framing *Kompas.com*, *Detik.com* dan *Republika.co.id* dalam mengemas berita mengenai pasca dilantiknya Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai gubernur DKI Jakarta 2017-2022 memiliki pandangan yang berbeda. *Kompas.com* misalnya, dalam pemberitaannya justru cenderung lebih mengkritisi kebijakan yang ditempuh oleh Anies Baswedan, tiga berita dari lima berita yang menjadi fokus dalam penelitian ini terlihat bagaimana *Kompas.com* mengkritik langkah kebijakan Anies Baswedan. Kemudian *Detik.com*, *Detik.com* memiliki pandangan yang lebih netral dalam setiap pemberitaannya mengenai langkah kebijakan yang diambil oleh Anies Baswedan. Berbanding terbalik dengan *Kompas.com*, *Republika.co.id* justru cenderung membela Anies Baswedan.
2. Media online *Kompas.com*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id* tentu harus bisa seobjektif mungkin dalam setiap berita yang ditampilkannya.

Kompas.com meskipun terlihat kerap kali tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Anies Baswedan, *Kompas.com* juga memberikan kritik dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang kredibel untuk setiap polemik yang terjadi. Hal serupa juga dilakukan oleh *Detik.com*, dalam setiap pemberitaannya *Detik.com* selalu menghadirkan narasumber yang kredibel sehingga dalam pemberitannya, *Detik.com* mencoba menjadi media online yang senetral mungkin. *Republika.co.id* meskipun cukup membela kebijakan yang diambil oleh Anies Baswedan, namun juga tak serta-merta tanpa bukti, bukti yang ditampilkan ialah dengan pemilihan-pemilihan narasumber yang dirasa cukup baik untuk dimintai pandangannya mengenai setiap isu yang menjadi polemik.

5.2 Saran

1. Saran Praktis

Sebagai media online yang sudah berskala nasional, baik *Kompas.com*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id* diharapkan mampu lebih bersikap lebih netral dalam setiap pemberitaannya. Netralitas dalam setiap pemberitaan yang disajikan kepada masyarakat tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pembaca dari media tersebut.

2. Saran Teoritis

Adanya penelitian ini, peneliti berharap agar baik *Kompas.com*, *Detik.com*, dan *Republika.co.id* memiliki nilai berita yang lebih berimbang

dan bersifat objektif. Lebih lanjut, peneliti berharap kedepannya agar kedepannya penelitian serupa tidak hanya memakai kajian teoritis saja dengan menggunakan teori framing tapi ditambah dengan wawancara kepada wartawan yang menulis berita atau kepada perwakilan dari media tersebut sehingga hasil objektivitas dari media yang diteliti dapat lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardianto, Elvinaro dkk. 2004. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____. 2013. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Denis McQuail. 1987. *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*. Jakarta: Erlangga
- Eriyanto. 2007. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS
- _____. 2008. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- _____. 2012. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penulisan Ilmu Komunikasi dan Ilmu Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit
- Haris, Syamsuddin (ed). 2005. *Pemilu Langsung di tengah Oligarki Partai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Romli, Asep Syamsul M. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung. Nuansa Cendekia
- Shaffat, Idri. 2008. *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sobur, Alex.. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2009. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta

Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik Terapan*. Bogor. Ghalia Indonesia

Skripsi

Afdiningsih, Fuji Lara Sakti. 2016. *Konstruksi Diskresi Ahok Untuk Reklamasi (Analisis Framing Pemberitaan Reklamasi Jakarta Pada Majalah Tempo)*. Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Apriyani, Nurul. 2016. *Analisis Berita KPK vs Polri (Frame Analysis Model Gamson pada Majalah Tempo Edisi 9-22 Februari 2015)*

Lestari, Dian. 2017. *Konstruksi Berita Jalur Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 (Analisis Framing Pada Harian Kompas Edisi Juni-Juli 2016)*. Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Prayogi, Ichsan Adil. 2015. *Peningkatan Berita Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ8501 oleh Koran "Kompas dan Radar Banten" (Analisis Framing Robert N. Entman pada Koran Kompas dan Radar Banten Periode 30 Desember 2014-13 Januari 2015)*

Noviono, Sumardi. 2015. *Realitas Jokowi Dalam Pemberitaan Kompas.com di Rubrik "Politik" (Analisis Framing Pemberitaan Jokowi Pada Rubrik "Politik" di Kompas.com Periode Oktober 2014)*. Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Sumber lain

<https://pilkada.jpnn.com/news/ini-asal-usul-slogan-anies-sandi-maju-kotanya-bahagia-warganya>

<https://www.viva.co.id/siapa/read/32-anies-baswedan/>

<http://jakartamajubersama.com/biografi-sandiaga-uno/>

<https://nasional.tempo.co/read/1045161/kaleidoskop-2017-setelah-pilkada-rasa-sara-dan-politik-identitas>

<http://nasional.Kompas.com/read/2017/10/27/22221201/prihatin-fenomena-pilkada-dki-kpu-atur-soal-isu-sara-dalam-dua-peraturan/>

<https://kpujakarta.go.id/view-berita/kpu-dki-tetapkan-hasil-rekap-perolehan-suara-putaran-kedua>

<https://nasional.Kompas.com/read/2017/10/16/16162801/jokowi-lantik-anies-sandi-sah-jakarta-punya-gubernur-wagub-baru/>

<http://www.Republika.co.id/berita/nasional/politik/17/03/17/omyio3330-penelitian-pdb-ahokdjarot-dinilai-efektif-manfaatkan-isu-sara>

<https://megapolitan.Kompas.com/read/2017/04/02/20243561/djarot.bilang.mereka.dihambat.isu.sara.di.putaran.pertama.pilkada.dki>

<https://beritagar.id/artikel/laporan-khas/para-pengukir-sejarah-media-daring-indonesia>

<https://inside.Kompas.com/about-us>

<https://www.Republika.co.id/page/about>

LAMPIRAN

KOMPAS.COM

BERITA 1

Polemik Kata "Pribumi" di Awal Kepemimpinan Anies Baswedan

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/18/08444021/polemik-kata-pribumi-di-awal-kepemimpinan-anies-baswedan/> 18-10-2017. 08:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung menyampaikan pidato politik pertamanya di hadapan warga pada Senin (16/10/2017) malam.

Salah satu hal yang disampaikan Anies yakni sejarah panjang Republik Indonesia yang terjadi di Jakarta, seperti Sumpah Pemuda, perumusan garis besar Republik Indonesia, hingga proklamasi kemerdekaan.

Anies mengatakan, setiap sudut di Jakarta menyimpan sejarah, sejak era Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, hingga Jakarta yang merupakan kisah pergerakan peradaban manusia.

Menurut Anies, berakhirnya penjajahan yang pernah terjadi di Jakarta selama ratusan tahun harus dijadikan momentum bagi pribumi melakukan pembangunan dan menjadi tuan rumah yang baik.

"Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan (dijajah). Kini telah merdeka, saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies dalam pidato politiknya di Halaman Balai Kota DKI Jakarta.

Kemerdekaan di Indonesia, kata Anies, direbut dengan usaha sangat keras sehingga alam kemerdekaan harus dirasakan semua warga.

Kata "pribumi" dalam pidato itu kembali menghangatkan dunia maya. Ucapan Anies dalam pidato politiknya itu dicerca, ada juga yang membela.

Keesokan harinya, Selasa (17/10/2017), Anies menjelaskan, kata "pribumi" yang dia sampaikan dalam pidato politiknya terkait dengan masa penjajahan Belanda di Indonesia, termasuk Jakarta. Dia tidak merujuk penggunaan kata tersebut di era sekarang.

"Oh, istilah itu (pribumi) digunakan untuk konteks pada era penjajahan karena saya menulisnya juga pada era penjajahan dulu," kata Anies.

Anies mengatakan, Jakarta adalah kota yang paling merasakan penjajahan Belanda di Indonesia. Menurut dia, warga Jakarta-lah yang melihat penjajahan itu di depan mata.

Penggunaan kata "pribumi" dilarang

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengingatkan, ada Undang-undang dan Instruksi Presiden yang melarang penggunaan kata "pribumi" dan "keturunan".

Sumarsono mengatakan, aturan itu untuk semua warga dan pejabat negara.

"Semua pejabat negara dan kita warga bangsa, hindari pakai istilah pribumi, itu UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis," ujar Sumarsono ketika dihubungi, Selasa.

Selain UU tersebut, hal ini juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sumarsono mengatakan, penggunaan kata pribumi dan non-pribumi diganti dengan kata Warga Negara Indonesia.

Saat ditanya mengenai adanya aturan yang melarang penggunaan kata pribumi dan non-pribumi, Anies hanya menjawab, "Cukup ya."

Dilaporkan ke Bareskrim

Organisasi sayap PDI-P, Banteng Muda Indonesia (BMI), melaporkan Anies ke polisi terkait pidatonya yang mengandung kata-kata pribumi.

BMI mulanya datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pada Selasa. Namun, laporan ini tidak diterima. Polda Metro Jaya mengarahkan BMI agar membuat laporannya di Bareskrim Mabes Polri.

Selasa malam, BMI akhirnya melaporkan Anies ke Bareskrim Polri di Gambir, Jakarta Pusat.

"Kami melaporkan saudara Anies Baswedan terkait isi dari sebagian pidato politik kemarin mengenai kata pribumi dan non-pribumi. Kami dari Polda Metro Jaya tapi dilimpahkan ke Bareskrim," ujar Kepala Departemen Pidana Hukum dan HAM DPD Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta Pahala Sirait seperti dikutip Tribunnews.com.

Pahala menyebut ucapan Anies tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 2008 dan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998.

BMI melampirkan barang bukti berupa berkas lampiran pidato dan video Anies saat berpidato di Balai Kota. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno enggan menanggapi perihal pelaporan ini.

BERITA 2

Penataan PKL Tanah Abang "Out Of The Box", tapi Banyak yang Dilanggar

<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/29/17010401/penataan-pkl-tanah-abang-out-of-the-box-tapi-banyak-yang-dilanggar/> 29-12-2017. 17:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Ombudsman RI Adrianus Meliala mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memilih langkah untuk menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang di jalan. Bukan justru mendorong mereka pindah ke blok yang telah disiapkan, yaitu Blok G.

Menurutnya, momentum rotasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa merealisasikan hal tersebut.

"Yang kami tak duga, setelah rotasi satpol bukannya mendorong para PKL ke blok yang sudah ada, malah ditempatkan ke jalan. Ini sesuatu yang kami tidak duga sama sekali. Apakah ini terobosan?" ujar Adrianus di Gedung Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017)

Ia mempersilakan jika Pemprov DKI memilih terobosan untuk menertibkan PKL dan membuat maju kotanya. Cara yang "out of the box" pun bisa dipilih dalam melakukan penertiban.

Namun, Adrianus menilai terlalu banyak ketentuan yang dilanggar.

"Kalau dibilang diskresi, ada dua hal. Pertama, diskresi umumnya buat orang bukan kelompok PKL. Kedua, diskresi bersifat temporer dan sementara, ini bersifat jangka panjang. Apakah diskresi dapat dilakukan? Menurut kami kok tidak," tuturnya.

Ombudsman pun meminta Pemprov DKI segera membereskan masalah hukumnya.

Bisa melalui revisi peraturan perundang-undangan, bisa pula menerbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur.

Di samping itu, Adrianus menilai ada pemangku kepentingan lain yang tak diuntungkan dengan adanya kebijakan penertiban tersebut. Bahkan cenderung dirugikan. Misalnya, para pemilik toko di kawasan tersebut.

"Artinya kan ada yang berpihak nih, apakah ini dalam rangka kebijakan atau malaadministrasi? Harus jelas," tegasnya.

Adapun Ombudsman melakukan investigasi terhadap lokasi yang potensial terdapat pelanggaran administrasi terhadap peran Satpol PP.

Salah satu kawasan yang diinvestigasi adalah Tanah Abang.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa belum ada tindakan nyata dari Gubernur DKI dan Satpol PP DKI Jakarta terkait penertiban dan penataan PKL.

"Kami punya tiga jenjang, potensi malaadministrasi, indikasi, lalu baru malaadministrasi. Maka sementara di awal indikasinya potensi (malaadministrasi)," ujar Adrianus.

"Makanya kami akan rapat pada Januari mendatang untuk apakah kita akan terus untuk kegiatan yang bersifat serius dalam hal ini untuk membuktikan yg potensi jadi indikasi dan mal. Kalau sudah maal kami boleh berikan rekomendasi," sambung dia.

Klaim tak melanggar

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, tim hukumnya sudah memastikan kebijakan memindahkan PKL Tanah Abang ke jalanan tidak melanggar hukum.

Seperti diketahui, kebijakannya tersebut dianggap berbenturan dengan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melarang penggunaan badan jalan dan trotoar sebagai tempat parkir dan usaha.

"Silakan (disebut melanggar hukum) itu juga kami terima masukannya, tim hukum juga akan memastikan bahwa awalnya itu kami yakin tidak ada penutupan jalan lalu lintas, tim hukum kami berikan clearance jadi nanti kita lihat lagi bagaimana secara menyeluruh, komprehensif pandangan daripada berbagai segi untuk penataan ini," ujar Sandiaga ditemui di Kawasan Kota Tua, Sabtu (23/12/2017).

Sandiaga meminta masyarakat tak buru-buru menilai.

"Ini kan baru dua hari, masih panjang dan kita sabar melihatnya, dan kita beri kesempatan penataan ini akan tepat di hati masyarakat," ujar Sandi.

Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan kawasan Pasar Tanah Abang dengan menutup Jalan Jatibaru Raya di depan Stasiun Tanah Abang. Jalan sepanjang 400 meter itu ditutup agar pedagang kaki lima bisa berjualan di area tersebut.

Pemprov DKI juga menyediakan 372 tenda yang bisa didapatkan secara gratis tanpa pungutan retribusi.

Penataan itu telah dimulai sejak Jumat (22/12/2017) dan akan berlaku setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB.

BERITA 3

"OK OCE Ini Pelatihan Paling Aneh, Ini Pelatihan Cuap-cuap..."

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/09/14223421/ok-oce-ini-pelatihan-paling-aneh-ini-pelatihan-cuap-cuap/> 09-01-2018, 14:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, mengkritik pelatihan OK OCE yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dia menyebut pelatihan tersebut aneh karena pelatih hanya memberikan pelatihan secara lisan tanpa praktik. Afni mengetahui hal itu karena mengaku selalu menghadiri pelatihan OK OCE yang digelar di Jakarta Barat.

"Saya bingung, ini aneh, ini pelatihan paling aneh yang pernah saya datangi. (OK OCE) ini pelatihan cuap-cuap, Pak. Saya kontrol betul di Jakarta Barat," ujar Afni saat rapat Komisi B bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI di Gedung DPRD DKI, Selasa (9/1/2018).

Afni menjelaskan, pelatihan yang digelar di tiap kecamatan itu juga dinilai tidak siap. Dia menyebut, peserta pelatihan direkrut secara asal-asalan oleh lurah. Akibatnya, banyak peserta yang tidak mengerti pelatihan yang mereka ikuti.

"Jangan dipaksakan kalau memang itu tidak siap. Akhirnya, pelatihan itu memalukan kalau kata saya. Masih bagus anggota Dewan reses daripada pelatihan itu," kata Afni. Afni juga mempertanyakan apa yang dilakukan Pemprov DKI kepada para calon wirausaha setelah memberikan pelatihan. Sebab, Pemprov DKI tidak menyediakan lokasi sementara (loksem) ataupun lokasi binaan (lokbin) untuk mereka berwirausaha.

Lagi pula, selain Dinas UMKM, ada Dinas Perindustrian dan Energi serta Dinas Tenaga Kerja yang juga memberikan pelatihan dengan praktik. Menurut Afni, Dinas UMKM lebih baik mengalokasikan anggaran tersebut untuk kebutuhan lain.

"Anggaran segitu banyak pelatihan, Dinas Energi (mengadakan) pelatihan, buat apa? Kenapa Bapak (Kepala Dinas UMKM Irwandi) enggak bikin loksem yang banyak, tampung semua (pedagang)," ucap anggota fraksi Demokrat-PAN itu.

Sementara itu, Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta Irwandi mengakui bahwa pelatihan yang dilakukan Suku Dinas UMKM setiap wilayah memang hanya pelatihan lisan. Sebab, pelatihan yang lebih teknis dilakukan Dinas Perindustrian dan Energi serta Dinas Tenaga Kerja.

"Pelatihan teknis ada di Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja. Kalau di kami, Dinas kami, ya, cuap-cuap, memberikan motivasi bagaimana orang bisa berdagang, bagaimana orang bisa berusaha, bagaimana jadi pengusaha, pasti ada cuap-cuap," kata Irwandi se usai rapat.

BERITA 4

Masa Depan Becak di Jakarta dalam Kontrak Politik Anies-Sandi...

<http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/18/07581931/masa-depan-becak-di-jakarta-dalam-kontrak-politik-anies-sandi/> 18-01-2018. 07:58 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya, Sandiaga Uno saat memberikan sambutan di acara nikah massal di jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (31/12/2017). Nikah massal yang diadakan oleh pemerintah DKI Jakarta ini diikuti sebanyak 437 pasangan pengantin dari berbagai usia. (KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Nasib becak di Ibu Kota bisa jadi berubah di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Jika selama ini becak beroperasi kucing-kucingan, maka kini pemilik becak bisa leluasa menawarkan jasanya.

Tentu tidak benar-benar leluasa. Artinya, Anies dan Sandiaga hanya ingin becak beroperasi di jalan-jalan lingkungan. Becak tidak bisa masuk ke jalan protokol dan jalan besar lainnya.

"Jangan membayangkan becak berada di jalan-jalan di Jakarta. Tidak ada rencana itu. Jadi jangan berimajinasi ke sana," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (18/1/2018).

Anies mengatakan selama ini nyatanya becak memang ada di jalan-jalan lingkungan. Masih ada masyarakat yang menggunakan becak sehingga membuat becak masih dibutuhkan.

Ada sebuah organisasi bernama Sebaja atau Serikat Becak Jakarta yang punya 1.000 anggota. Tukang becak itu banyak tersebar di kawasan Jakarta Utara seperti di Teluk Gong, Tanah Pasir, Jelambar, Pejagalan, Muara Baru, Pademangan, Koja, dan lainnya.

"Faktanya ada dan selama ini mereka kejar-kejaran, kasihan hanya jadi korban," ujar Anies.

Penarik becak di stasiun Tanjung Priok Jakarta Utara, Selasa (16/1/2018). Perhatian terhadap penarik becak kembali diberikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Ia berharap becak tetap beroperasi di rute khusus di Jakarta (Kompas.com/Setyo Adi)

Bagian kontrak politik

Penataan becak ini merupakan janji yang ditandatangani Anies dalam kontrak politiknya bersama Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu.

Dalam kontrak yang ditandatangani saat Anies masih berstatus calon gubernur itu disebut bahwa Anies berjanji melindungi dan menata ekonomi sektor informal seperti becak, PKL, dan nelayan.

Anies membenarkan kontrak politik itu. Selayaknya janji yang harus ditepati, kontrak politik itu juga harus lunas.

"Kalau saya berjanji, saya harus melunasi," ujar Anies.

Lalu, apa selama ini Anies terbelenggu dengan kontrak politik tiap kali membuat kebijakan? Dia menjawab sama sekali tidak. Menurut dia, janji tidak akan dibuat tanpa ada sebuah pertimbangan. Ketika dirinya membuat kontrak politik, dia sudah mempertimbangkan isi kontrak tersebut.

"Tidak terbelenggu. Jadi janji itu adalah sesuatu yang ketika dibuat sudah dengan pertimbangan. Kami ketika menandatangani itu melihat mana yang bisa dikerjakan mana yang tidak bisa," ujarnies.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (10/1/2018) malam. (KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Pemerintah sebelumnya

Sementara itu, Sandiaga Uno mengatakan pemerintahannya ingin membangun sebuah kesinambungan dengan pemerintah sebelumnya

Dalam hal becak, kata Sandiaga, pemerintahan sebelumnya di bawah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama juga pernah membuat kontrak politik yang sama dengan Anies dan dia.

"Untuk becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya yang juga harus kami tunaikan. Jadi, kami buat dalam satu kontinuitas, satu kesinambungan," ujar Sandiaga.

Dia ingin melaksanakan janji yang telah diberikan sejak periode pemerintahan dulu. Dirinya dan Anies memang memiliki beberapa kontrak politik. Kata dia, semua janji akan dipenuhi.

"Kami ada beberapa kontrak politik, kami tabulasi, dan kami akan tunaikan semuanya. Jadi, tidak memilah-milah mana kontrak politik," ujar Sandiaga.

Pada 2012, Joko Widodo yang dulu masih berstatus calon gubernur juga pernah membuat kontrak politik dengan warga bantaran Waduk Pluit di Muara Baru. Isi kontraknya tidak terlalu berbeda dengan kontrak yang disebut telah ditandatangani Anies.

Kontrak itu salah satunya meminta Jokowi melindungi dan menata ekonomi informal, seperti PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional. Kontrak itu ditandatangani 15 September 2012.

BERITA 5

Kembalinya Sepeda Motor Melintas di Thamrin yang Menuai Pro Kontra...

<http://megapolitan.kompas.com/read/2018/01/15/10393281/kembalinya-sepeda-motor-melintas-di-thamrin-yang-menuai-pro-kontra/> 15-01-2018. 10:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperbolehkan kendaraan roda dua atau sepeda motor masuk dan melintas di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

Kebijakan itu tak terlepas dari keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut peraturan gubernur (pergub) soal pelarangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

Pergub yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Kedua pergub itu diteken Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta.

Dengan terbitnya putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017, Pemprov DKI harus membebaskan kembali sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

Pencabutan pergub itu bukannya tanpa alasan karena pihak MA berargumen bahwa pergub tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

MA menyebutkan, Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Maka, MA meyakini bahwa pergub itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Larangan motor melintas di Jalan MH Thamrin dicabut, sejumlah pengendara roda dua diperbolehkan melintasi kawasan tersebut, Rabu (10/1/2018).(Kompas.com/David Oliver Purba)

Pencabutan rambu

Keputusan MA tersebut kemudian langsung ditindaklanjuti dengan pencabutan rambu larangan sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat pada 9 dan 10 Januari 2018.

Pencabutan rambu tersebut dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan dibantu anggota kepolisian.

Sejak saat itu, pengendara sepeda motor bebas melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat.

Pencabutan pergub yang kemudian berujung pada pencabutan rambu larangan sepeda motor itu pun kemudian disambut baik oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu menyatakan, keputusan MA mencabut pergub larangan sepeda motor bukan sekadar kabar baik bagi warga Ibu Kota. "Bukan cuma kabar baik, ini

Orang nomor satu di DKI Jakarta itu menyatakan, keputusan MA mencabut pergub larangan sepeda motor bukan sekadar kabar baik bagi warga Ibu Kota.

"Bukan cuma kabar baik, ini artinya kita menjalankan sesuatu berdasarkan prinsip keadilan," ujarnya.

Menurut Anies, keputusan MA ini sejalan dengan ide yang pernah digagasnya untuk menghadirkan kesetaraan, kesempatan, dan keadilan bagi masyarakat Jakarta.

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa keputusan MA mencabut pergub larangan sepeda motor itu telah diprediksi dirinya.

Ya, itu (pembatalan larangan motor melintas) sudah terprediksi kami. Sebab, itu kan mengembalikan rasa keadilan," ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (8/1/2017).

Kondisi jalan MH Thamrin Kamis (11/1/2018) pasca pencabutan rambu larangan melintas sepeda motor. Jalan Medan Merdeka Barat dan MH Thamrin kembali dapat dilalui sepeda motor setelah pembatalan pergub yang membatasi sepeda motor oleh mahkamah agung.(Kompas.com/Setyo Adi)

Ia melanjutkan, sebelum putusan ini ditetapkan, pihaknya sudah mulai menyiapkan kajian penataan jalan dan trotoar di ruas Jalan Thamrin.

"Jadi, kebetulan kami memang lagi mengkaji, tetapi kami menunggu hasil kajian dari Pak Yumada dari Kepala Dinas Bina Marga berkaitan dengan desain Jalan MH Thamrin setelah trotoar dirapikan. Jadi, kami kalau dari MA sudah keluar, kami harus percepat dan kota akan tindak lanjuti," ucapnya.

Disayangkan pihak kepolisian

Sikap Pemprov DKI yang menindaklanjuti keputusan pencabutan pergub larangan sepeda motor oleh MA disayangkan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra.

Menurut Halim, pencabutan larangan tersebut tidak efektif lantaran selama ini ketiadaan sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat memberikan banyak hal positif.

"Saya kira tidak efektif karena sudah efektif dengan adanya pelarangan," ujar Halim saat dihubungi, Selasa (9/1/2018).

Halim menjelaskan, berdasarkan pengamatannya, pelarangan sepeda motor di kawasan tersebut mampu mengurangi kepadatan lalu lintas.

"Karena sudah ada hasil penelitian dari Dinas Perhubungan dan perguruan tinggi itu. Kemudian mind set masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi massal meningkat, lalu polusi juga berkurang," imbuh Halim.

Kendati kurang setuju, Halim mengaku akan mengikuti peraturan yang sudah diputuskan itu. Jika nantinya sepeda motor kembali diperbolehkan melintasi kawasan tersebut, pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas.

"Kalau terjadi kepadatan, nanti ada beberapa rekayasa, sementara nanti kalau memang sudah sudah cocok dibuatkan peraturan gubernur," pungkas dia.

Kepolisian berharap akan ada evaluasi kebijakan ini setelah satu bulan diterapkan.

DETIK.COM

BERITA 6

Anies Dilaporkan soal Pidato Pribumi, Sandiaga: Nggak Ada Komentar

https://news.detik.com/berita/d-3689108/anies-dilaporkan-soal-pidato-pribumi-sandiaga-nggak-ada-komentar?_ga=2.42475109.1112154192.1519539485-745290108.1518244340/ 18 Oktober 2017, 12:24 WIB

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menolak berkomentar soal dilaporkannya Gubernur Anies Baswedan ke polisi. Anies dilaporkan terkait pidato pribumi.

"Nggak ada komentar soal itu," ujar Sandiaga kepada wartawan di Teater Keong Mas TMII, Rabu (18/10/2017).

Anies dilaporkan ormas Gerakan Pancasila ke polisi pada Selasa (17/10) malam. Laporan tersebut diterima Bareskrim Polri dengan LP/1072/X/2017/ tertanggal 17 Oktober 2017.

Koordinator Gerakan Pancasila Jack Boyd Lopian mengatakan kata 'pribumi' yang disebut Anies dalam pidato di Balai Kota diduga bisa memecah belah keberagaman di Indonesia. Anies dilaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

"Yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih pada 16 Oktober 2017 saat sesi acara sertijab sehubungan dengan pidato politik," kata pengacara Gerakan Pancasila, Rudi Kabunang.

Pidato Anies Dianggap Sesuai Ketentuan

Soal pidato di hadapan warga pada Senin (16/10), Anies mendapat pembelaan dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). ACTA menilai tidak ada yang salah dengan istilah 'pribumi' yang diungkapkan Anies.

"Ratusan advokat ACTA akan pasang badan membela Gubernur Anies Baswedan terkait istilah 'pribumi' yang disampaikan dalam pidato di Balai Kota, 16 Oktober 2017. Kami telah membaca berita soal pidato tersebut secara saksama dan menurut kami tidak ada yang salah dengan pidato tersebut," ujar Ketua ACTA Krist Ibnu T Wahyudi.

(fdn/fjp)

BERITA 7

Penataan Tanah Abang, Anies: Semuanya Sesuai Aturan

https://news.detik.com/berita/d-3783322/penataan-tanah-abang-anies-semuanya-sesuai-aturan?_ga=2.213277012.1112154192.1519539485-745290108.1518244340/ 23 Desember 2017, 18:55 WIB

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang untuk mengakomodasi pedagang kaki lima tidak melanggar aturan. Anies mengaku sudah meninjau semua aturan sebelum penataan tersebut dilakukan.

"Semuanya kita jalankan sesuai dengan aturan, semua kita jalankan, kita sudah *review* semua aturan," kata Anies di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2017).

Dia menegaskan konsep penataan tersebut merupakan upaya keberpihakannya kepada masyarakat, baik itu PKL, *commuter*, pejalan kaki, hingga transportasi umum.

"Dan kita akan jelas berpihak kepada mereka yang juga ingin mendapatkan kesempatan hidup, kesempatan untuk merasakan peredaran kegiatan ekonomi di wilayah Tanah Abang," ujarnya.

Anies akan memastikan kebijakannya tersebut akan memberikan manfaat kepada semua pihak. Dia akan selalu mengevaluasi pelaksanaan konsep penataan tersebut.

"Semuanya nanti akan kita *review* dan kita pastikan bahwa trotoarnya dalam keadaan tertib, bersih dari mereka yang menghambat jalannya pejalan kaki, sehingga pejalan kaki daerah itu bisa leluasa berjalan," sambung Anies.

BERITA 8

OK OCE Disebut Hanya Cuap-Cuap, Sandi: Pelatihan Memang Seperti Itu

https://news.detik.com/berita/d-3806767/ok-oce-disebut-hanya-cuap-cuap-sandi-pelatihan-memang-seperti-itu?_ga=2.120519307.2054263686.1531018779-1032132200.1531018779/ Selasa 09 Januari 2018, 18:11 WIB

Jakarta - Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno menjawab kritik anggota Komisi B DPRD DKI Nur Afni Sajim yang menyebut pelatihan OK OCE hanya cuap-cuap belaka. Menurut Sandiaga, pelatihan kewirausahaan, seperti OK OCE, memerlukan penjelasan dengan kata-kata.

"Kalau program cuap-cuap pelatihan ya memang seperti itu ya," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Sandi pun meminta agar tidak meremehkan kata-kata. Ia setuju dengan pendapat Anies soal dibutuhkannya kata-kata untuk memulai langkah nyata.

"Ini yang Pak Anies bilang. Jangan sampai kata-kata itu didegradasi," ucapnya.

Selain itu, Sandi menyebut pelatihan kewirausahaan dalam program OK OCE seharusnya diberikan oleh pengusaha, bukan aparat Pemprov DKI. Namun ia memaklumi jika OK OCE berjalan belum seperti yang ia rencanakan.

"Yang harus memberikan pendampingan dan pelatihan ini pengusaha. Karena ini masih awal-awal mungkin masih agak sedikit rancu, mudah-mudahan lebih baik ke depan," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi B Nur Afni Sajim meminta Dinas UMKM selektif menyaring pesertanya dan tidak melatih pedagang musiman. Ia mempersoalkan keterlibatan lurah dan camat dalam mencari pedagang peserta program OK OCE.

Anggota DPRD dari Fraksi Demokrat itu juga menilai Dinas UMKM tak perlu membuat pelatihan. Afni menyebut pelatihan yang digagas Dinas UMKM hanya 'cuap-cuap'.

"Bikin kegiatan yang baik, kalau Dinas UMKM nggak perlu buat pelatihan nggak apa-apa. Wong pelatihan juga hanya paparan, pedagangnya juga nggak ngerti. Ini pelatihan cuap-cuap, dan saya kontrol betul itu pelatihan di Jakbar," terang Afni saat rapat antara Komisi B DPRD DKI Jakarta dan Dinas UMKM di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

(HSF/nvl)

BERITA 9

Soal Pengoperasian Becak, Sandi: Ada Kontrak Politik, Kita Tunaikan

https://news.detik.com/berita/d-3819098/soal-pengoperasian-becak-sandi-ada-kontrak-politik-kita-tunaikan?_ga=2.171310432.1112154192.1519539485-745290108.1518244340/ 17 Januari 2018, 10:57 WIB

Jakarta - Kebijakan soal becak disebut berasal dari kontrak politik Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Kebijakan tersebut dikeluarkan terkait janji perlindungan untuk becak.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menjawab diplomatis saat dimintai konfirmasi soal janji tersebut. Sandiaga tak membantah adanya kontrak politik dan, menurutnya, hal itu akan ditunaikan semua.

"Kita punya ada beberapa kontrak politik dan kita tabulasi. Kita akan tunaikan semuanya, tidak memilah-milah mana kontrak politik," kata Sandiaga di gedung Blok G, Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).

Sandiaga mengatakan pemerintah DKI sebelumnya juga memiliki kontrak politik soal becak. Namun Sandiaga tak memaparkan maksud kontrak politik tersebut. Dia menuturkan akan menjalankan kontrak politik yang dimaksud.

"Dan untuk becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya juga yang harus kita tunaikan. Jadi buat kita, buat dalam satu kontinuitas satu kesinambungan," terang dia.

Sementara itu, sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melontarkan wacana pengoperasian becak saat meluncurkan program Community Action Plan (CAP) di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Minggu (14/1). Tak lama setelah itu, beredar lembaran kontrak politik Anies-Sandi dengan komunitas Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, yang merupakan komunitas warga Tanah Merah, Kelurahan Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara.

Dalam lembaran tersebut, ada 3 poin kontrak, termasuk soal janji perlindungan dan pengelolaan becak. Dari foto yang beredar, lembar kontrak politik itu diteken Anies pada 2 Oktober 2016.

Soal pengoperasian becak ini, Anies juga mengaku kerap diingatkan oleh warga yang dikunjunginya. Warga bertanya soal kepastian mewujudkan janji dalam kontrak politik. Dia mengatakan warga juga kerap menyodorkan kontrak politik pemerintahan sebelumnya

"Saya tuh sering sekali kalau datang ke kampung-kampung, pada *nanya*, 'Pak Anies, Bapak *blenjani* (ingkar) nggak nanti'? Sering itu. Saya itu, ketika

disodorkan kontrak politik, saya bilang, 'Ini kan kontak politik yang dulu,'" kata Anies saat dimintai konfirmasi soal wacana pengoperasian becak di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/1).

Anies berjanji kepada warga akan melunasi kontrak politiknya. Dia bahkan menyinggung kontrak politik mengenai proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang menurutnya sudah dilunasi.

(zak/jbr)

BERITA 10

Ungkapan Senang Para Rider Ketika Boleh Melintas Lagi di Jl Thamrin

https://news.detik.com/berita/d-3808347/ungkapan-senang-para-rider-ketika-boleh-melintas-lagi-di-jl-thamrin?_ga=2.49043046.1112154192.1519539485-745290108.1518244340/ 10 Januari 2018, 16:16 WIB

Jakarta - Pengendara motor kini dapat kembali melewati Jalan Thamrin menuju Bundaran HI-Monas. Banyak pengendara motor yang merasa terbantu atas dibukanya Jalan Thamrin.

"Wah enak, *bener-bener* terbantu banget, bisa lebih *cepat* sampai tempat tujuan tanpa harus *muter-muter*," ujar pengendara motor Didi (30) di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).

Sama halnya dengan Didi, Akbar (25), pengendara motor yang akan menuju kawasan HI, mengaku senang. Menurut Didi, dicabutnya larangan motor melintas di Jalan Thamrin ini membuat dia dapat menghemat waktu dan terhindar dari macet.

"Rasanya *seneng*, nggak perlu lewat perempatan belakang Sarinah yang macet, waktu tempuh jadi lebih *cepat* dan mengurangi stres karena kena macet," ujar Akbar.

Mereka yang Tak Setuju

Banyak yang setuju tapi tak sedikit pula warga yang merasa keberatan atas dicabutnya larangan motor yang melintas. Salah satunya Gaung (33), tukang ojek di perempatan Thamrin, mengaku keberatan terhadap keputusan MA.

"Kalau menurut saya sih mendingan tak usah dikasih motor, khusus *mobilaja*. Takutnya kayak dulu suka banyak kejadian kecelakaan motor, apalagi jalan di sana (Bundaran HI) tahu sendiri tak ada pelannya itu mobil. Tapi tak tahu juga sekarang kalau baru dibuka," ujar Gaung.

Hal yang sama dikatakan warga Tanah Abang, Jay (49). Menurutnya, dicabutnya larangan bagi pengendara motor dapat menyebabkan kesemrawutan di Jalan Thamrin.

"Kalau dibuka lagi semrawut lagi Jalan Thamrin, nanti semrawut lagi banyak yang mangkal nanti di trotoar," ujar Jay. Sebelumnya, MA membatalkan Pergub DKI Jakarta No 195/2014 tentang Perubahan atas Pergub DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dalam pergub itu,

pada pukul 06.00-23.00 WIB, motor dilarang melintas di HI-Monas.

Kini pembatasan motor tersebut sudah dicabut dan motor pada hari ini sudah boleh melintas tanpa ada batasan jam.

(rvk/rvk)

REPUBLIKA.CO.ID

BERITA 11

ACTA Siap Bela Anies Soal Pidato 'Pribumi'

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/18/oxzu0t409-acta-siap-bela-anies-soal-pidato-pribumi/> Rabu 18 Oktober 2017 07:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Krist Ibnu T Wahyudi mengungkapkan, ratusan advokat siap membantu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pidatonya yang dilaporkan ke polisi. Ratusan advokat dari ACTA ini akan pasang badan membela Gubernur Anies. "Kami telah membaca berita soal pidato tersebut secara seksama dan menurut kami tidak ada yang salah dengan pidato tersebut," ungapnya dalam keterangan pers, Selasa (17/10) malam.

Secara kontekstual Anies menyampaikan istilah pribumi secara sangat tepat. Yaitu, saat berbicara soal perjuangan pribumi melawan kolonialisme pada masa sebelum kemerdekaan. Saat itu topiknya mengenai bagaimana pribumi dulu ditindas oleh penjajah. "Saya pikir mereka yang menuduh Anies rasis mesti belajar sejarah. Padahal Bung Karno pernah berpesan jangan sekali-kali melupakan sejarah," ungap Wahyudi.

Sejak kecil di bangku sekolah, kata Wahyudi, pendidikan memang mengajarkan bahwa dahulu pribumi pernah dijajah oleh kolonialis. Maka, secara redaksionalm Wahyudi melanjutkan, istilah yang disampaikan Anies tidak masalah. Secara persis Anies menyebutkan, "Dulu kita semua pribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri,".

Penggunaan kata kita semua pribumi jelas membuktikan bahwa yang dimaksud Anies adalah semua elemen bangsa Indonesia yang berhadap-hadapan dengan kolonialis asing. Karena itu, ACTA meminta Gubernur Anies tidak perlu risau dengan laporan ke polisi terkait pidato tersebut. "Mas Anies konsentrasi saja kerja melayani rakyat Jakarta. Kami yakin urusan ini tidak akan kemana-mana dan tidak ada celah untuk menjerat Mas Anies secara hukum," tegasnya.

BERITA 12

Penataan Tanah Abang Berdayakan PKL, Muliakan Pejalan

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/12/23/p1dxqi377-penataan-tanah-abang-berdayakan-pkl-muliakan-pejalan/> Sabtu 23 Desember 2017 06:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, penataan Tahap 1 kawasan Tanah Abang, yang mulai dilakukan pada Jumat (22/12) ini, tidak hanya memberdayakan pedagang kaki lima (PKL), tetapi juga memuliakan pejalan kaki.

Yayat mengatakan, proses penataan tersebut masih merupakan tahap awal. Nantinya akan ada pemindahan kegiatan stasiun kereta api di kawasan tersebut.

"(Penataan)Ini tahapan awalnya itu sifatnya sementara. Itu kan cuma antisipasi berapa jumlah pedagang PKL yang ada di sana. Kemudian sebetulnya kan mereka tidak mampu secara ekonomi, jadi salah satu cara yang dilakukan adalah memfasilitasi tapi sekaligus dalam proses menata kawasan tanah abang," kata Yayat saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (22/12) malam.

Selain itu, Yayat mengatakan, penataan tersebut juga bertujuan untuk menata pihak-pihak yang memanfaatkan kehadiran PKL. Seperti adanya pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

"Jadi yang ditertibkan bukan hanya PKLnya saja, tali juga menata orang-orang yang memanfaatkan kehadiran PKL. Supaya tidak ada pihak yang memanfaatkan Tanah Abang itu untuk kepentingan-kepentingan mencari keuntungan," tambahnya. "Yang parkir di trotoar itu harus ditindak, yang ngotorin trotoar itu harus ditindak (juga)," kata Yayat.

Untuk itu, pemerintah tambahnya, harus terus mengevaluasi dan mengontrol penataan tersebut kedepannya. Jika terdapat kekurangan-kekurangan dari program tersebut, nantinya agar dapat diperbaiki.

"Kita lihat dalam seminggu dua minggu ini lah, kalau ada perubahan ataupun kekurangan nanti bisa diperbaiki. Apakah kondisi ini lebih baik atau tidak. Kalau ada kekurangan itu nanti diperbaiki," katanya.

BERITA 13

Program Pelatihan OK OCE Dikritik, Ini Jawaban Santai Sandi

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/09/p2alue377-program-pelatihan-ok-oce-dikritik-ini-jawaban-santai-sandi/> Selasa 09 January 2018 21:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menanggapi ringan kritik mengenai program pelatihan One Kecamatan One Center of Entrepreneurship (OK-OCE). Pelatihan itu disebut kurang praktis atau hanya berisi kata-kata tanpa tindak lanjut yang jelas alias "cuap-cuap".

Sandiaga mengatakan hal itu wajar terjadi dalam sebuah pelatihan. Ia bahkan menganggap mustahil suatu pelatihan dapat diberikan tanpa kata-kata. "Kalau program cuap-cuap, ya pelatihan itu memang seperti itu ya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/1).

Awalnya, Sandiaga mencontohkan ibunya, Mien R Uno, yang sering memberikan berbagai pelatihan. Politikus Gerindra itu lalu memainkan mimik wajahnya di hadapan para wartawan.

"Ya harus cuap, kalau diam aja, enggak bercuap, apa yang mau di....," kata Sandiaga bergurau sembari mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan melihat ke kanan dan ke kiri.

Ia sempat diam sesaat dalam posisi itu. Kelakuan Sandiaga ini mengundang tawa para wartawan yang ada di Balai Rung, Balai Kota DKI. "Kalau saya bilang saya akan berikan pelatihan, (diam lagi sambil mengatupkan bibir_rep), boleh enggak? Ini setiap kali saya buka mulut, namanya cuap," kata dia.

Sandiaga menjelaskan, pelatihan OK OCE bertujuan untuk memberikan contoh dan motivasi bagi para calon pengusaha dan pengusaha baru. Oleh karena itu, kata-kata menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

Ia juga mengingatkan pesan Gubernur Anies Baswedan untuk tak mendegradasi kata-kata. Ia meminta kata-kata yang disampaikan dalam pelatihan OK-OCE dihargai, sebab itu menjadi narasi dan gagasan yang harus disampaikan sebelum kerja sesungguhnya dimulai. "Gagasan itu diawali dari kata-kata," ujar dia.

Kendati demikian, mantan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini mengapresiasi kritik yang datang sebagai masukan. Ia mengakui pelatihan OK-OCE belum berjalan ideal.

Idealnya, pelatihan OK-OCE tidak dilakukan oleh aparat sipil negara (ASN), namun pengusaha. Mereka tidak hanya memberikan teori, namun juga akan menyediakan pendampingan.

Namun, pada praktiknya hal ini masih sedikit rancu. Ia berharap penyelenggaraan pelatihan OK OCE akan bisa digarap dengan lebih baik.

BERITA 14

Fakta: Becak Transportasi Ramah Lingkungan

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/16/p2npav354-fakta-becak-transportasi-ramah-lingkungan/> Selasa 16 Januari 2018 23:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengatakan becak merupakan transportasi yang manusiawi dan ramah lingkungan sebagaimana sepeda tanpa menggunakan motor. Azas menilai, becak cocok untuk transportasi di wilayah permukiman warga.

"Boleh juga becak diberi ruang kembali di Jakarta, asal ada aturan dan pengawasan yang konsisten," kata Tigor melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (16/1).

Menurut Tigor, becak bisa menjadi alat transportasi jarak pendek di permukiman dan transportasi wisata di lokasi pariwisata Jakarta. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat aturan dan mengawasi agar keberadaan becak di Jakarta bisa memberikan layanan yang aman, nyaman, tidak semrawut dan terkendali.

"Saat ini becak masih beroperasi di beberapa lokasi di Jakarta secara sembunyi-sembunyi dan terbatas. Becak memang masih dibutuhkan sebagai alat transportasi jarak pendek di kawasan permukiman," ujarnya.

Tigor mengatakan becak pertama kali dilarang di Jakarta oleh Gubernur Wiyogo pada 1989. Saat itu, dia bersama beberapa kawan menjadi kuasa hukum para penarik becak, tetapi akhirnya becak tetap dilarang.

Becak sempat diperbolehkan kembali di Jakarta oleh Gubernur Sutiyoso pada 1998 dengan alasan memberi salah satu alternatif pekerjaan kaum miskin pada masa krisis ekonomi. Namun, sekitar 2001, becak kembali dilarang di Jakarta oleh Sutiyoso juga. Saat itu, keberadaan becak di Jakarta memang sudah hampir habis.

BERITA 15

MA: Larangan Sepeda Motor Melintas Langgar HAM

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/01/12/p2fmqt335-ma-larangan-sepeda-motor-melintas-langgar-ham/>
Jumat 12 January 2018 14:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Humas MA Abdullah mengatakan bahwa putusan MA yang mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin hingga Merdeka Barat berdasarkan prinsip hak asasi.

"Sama-sama bayar pajak lalu kenapa dilarang, ini adalah prinsip awalnya yaitu pelanggaran terkait hak asasi," ujar Abdullah, di Gedung MA Jakarta, Jumat (12/1).

Abdullah mengatakan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta tersebut telah melanggar hak wajib pajak. Bila Pemerintah Daerah DKI Jakarta belum bisa memberikan akses bagi pengendara sepeda motor menikmati Jalan MH Thamrin, Bundaran Hotel Indonesia sampai Medan Merdeka Barat, maka peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang sudah ada, yaitu pasal 5 dan 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Maka kami meminta Pemda DKI diminta segera memberikan akses bagi pengendara motor untuk bisa menikmati Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat," ujar Abdullah.

Dengan diumumkan putusan MA di dalam berita negara maka Pergub DKI Jakarta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Lebih lanjut Abdullah mengatakan bahwa MA menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengenai pemberian akses bagi pengendara sepeda motor untuk melintas di Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat.

"Kapan dilaksanakan, tunggu kesiapan DKI, tidak ada tenggat waktu," ujar Abdullah.

MA melalui Hakim Irfan Fachrudin mencabut Peraturan Gubernur terkait larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, dan menyatakan kebijakan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu pasal 133 ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Selain itu pelanggaran motor masuk Jalan Thamrin juga dinilai Fachrudin tidak sesuai pasal 11 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Buku Bimbingan Skripsi

Pembimbing I
Pembimbing II

CATATAN BIMBINGAN
Kenny Pong S, Ph.D
Percus Sagita, M. Flom.

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARKIR DOSEN
	14/1/16	Dos 9	Dr
	8/2/17	Dos 1-3	Dr
	14/4/17	Bos 1	Dr
	2/5/17	Bos 1-2	Dr
	7/6/17	Bos 1-3	Dr
	2/7/18	1-3	Dr
	14/12	Bos 1	Dr
	14/4/19	Dos 1-2	Dr
	21/11/19	1-3	Dr
	7/3	Bos 2 - revisi	Dr

Catatan, tanggal yang sudah dibimbing dengan catatan tanggal pembimbingan minimal 1 kali (satu) minggu 2 pembimbingan minimal 18 hari setiap bulan.

Nidulena, Degan 82277 Caturwala NAI 58

NO	TANGGAL	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	PARKIR DOSEN
	5/4/18	Ace revisi	Dr
	3/4/1	Perbaikan Bos 2-2	Dr
	4/4	revisi program	Dr
	14/5	revisi analisis data	Dr
	20/5	Dos IV	Dr
	29/6	revisi bab 4	Dr
	7/7	revisi bab 4	Dr
	11/7	revisi bab 4	Dr
	16/7	ACC sidang skripsi	Dr

Catatan, tanggal yang sudah dibimbing dengan catatan tanggal pembimbingan minimal 1 kali (satu) minggu 2 pembimbingan minimal 18 hari setiap bulan.

Nidulena, Degan 82277 Caturwala NAI 58

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Sapto Andriyanto

Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 16 Agustus 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Mujair III No. 253 RT/RW: 03/10,
Kel. Karawaci Baru, Kec. Karawaci, Kota
Tangerang, Banten, 15116

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

E-Mail : sapto.andriyanto7@gmail.com

Telepon : 0877-7160-5558/0813-1442-9507



RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

- 1999 – 2005 : SDN Karawaci Baru III Kota Tangerang
- 2005 – 2008 : SMP Nusantara 1 Kota Tangerang
- 2008 – 2011 : SMKN 1 Kota Tangerang
- 2011 – 2018 : Ilmu Komunikasi Jurnalistik FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

PENGALAMAN MAGANG

- April 2015 – Desember 2015 : Research and Development Department
PT. Tunas Bola